

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan Kinerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampain LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut ini dimkasudkan sebagai perwujudan untuk Pertanggung Jawaban keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut hal ini diikut berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dan juga penetapan Kinerja Tahun 2021, disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk perbaikan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang akan ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran, Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin dan mempertahankan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program, sedangkan dalam jangka pendek, strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, Adapun dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tetap eksis di era otonomi daerah.

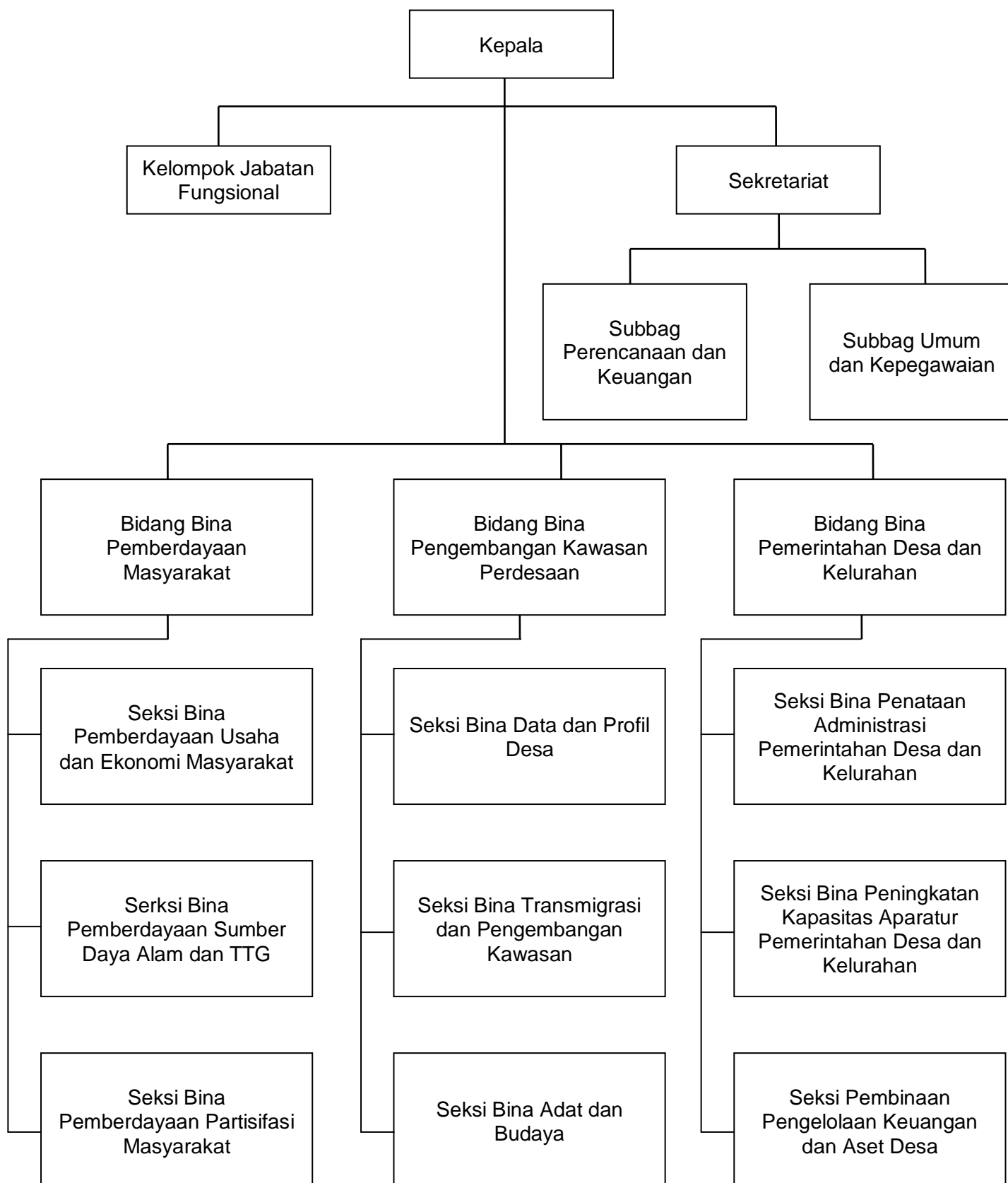
## A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub system dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (good governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna..

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indicator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut juga merupakan amanat Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP.

## B. TRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

### 1. STRUKTUR ORGANISASI DPMD KABUPATEN TANAH LAUT



## 2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan dan Desa, Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas, Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan Fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara professional sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

### C. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023 terutama untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu ;

- Belum optimalnya pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

- Masih rendahnya Kualitas aparatur tingkat desa dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat
- Pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta belum dimanfaatkannya BUMDES sebagai sumber pendapatan desa
- Belum sepenuhnya penggunaan dana desa sebagai penggerak perekonomian desa
- Belum optimalnya penggunaan pemetaan potensi desa sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat desa masih berjalan ditempat
- Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha – usaha produktif masih rendah
- Sebagian besar desa di kabupaten Tanah Laut belum memiliki RPJM Desa dan RKP desa
- Kurang optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat pembangunan desa
- Kurang optimalnya kegiatan pembinaan adat budaya desa
- Alokasi dana desa sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan fisik desa

Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang makin heterogen, sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Pada situasi semacam ini, hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa.

Hal ini mengandung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya memungkinkan dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimiliki ( local genius ) secara terarah dalam berbagai jangka waktu untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

Dengan adanya isu strategis Permasalahan pembangunan kabupaten Tanah Laut ini, masyarakat yang berdaya dan Pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi Penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain solusi tersebut maka Dinas Pemberdayaan masyarakat melakukan pemetaan permasalahan yang mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang menjadi urusan kewenangan Dinas Pemberdayaan masyarakat.

Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, DPMD Kabupaten Tanah Laut memiliki sumberdaya aparatur sampai pada keadaan Bulan Desember 2021 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai yang terdiri dari :

- Kepala Dinas : 1 (satu) orang (S2, Administrasi Publik, IV.c)
- Sekretaris : 1 (satu) orang (S2, Magister Administrasi, IV.b)

- Kepala Bidang : 3 (tiga) orang terdiri :
  1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (S2, Manajemen SDM, IV.a),
  2. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan (S2, Pemerintahan Desa, IV.a),
  3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan (S1, Administrasi Negara, IV.b).
- Kepala Seksi dan Sub Bagian : 11 (sebelas) Orang terdiri :
  1. Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (S1, Sarjana Ekonomi, III.d),
  2. Plt. Kepala Seksi Bina Sumber Daya Alam dan TTG (S1, Sarjana Sains Terapan, III.b),
  3. Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat (S1, Sarjana Sosial, III.d),
  4. Kepala Seksi Bina Data dan Profil Desa (S1, Sarjana Teknik, III.d),
  5. Kepala Seksi Bina Pengembangan Kawasan (S1, Sarjana Ekonomi, III.d),
  6. Kepala Seksi Bina Adat & Budaya Desa (S1, Sarjana Sosial, III.c),
  7. Kepala Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa & Kelurahan (S1, Sarjana Teknik, III.c),
  8. Kepala Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa & Kelurahan (S1, Administrasi Publik, III.c)
  9. Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan & Aset Desa (S1, Sarjana Hukum, III.c)
  10. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (S1, Sarjana Ekonomi, III.b)
  11. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian (S1, Sarjana Ekonomi, III.c)
- Staf Golongan III, 1 (satu) orang dan Staf Golongan II ada 14 (empat belas) orang

#### D. PRODUK DAN LAYANAN

Untuk lebih mengefektifkan Kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah maka berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1980 dibentuklah organisasi Dinas PMD selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PMD .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Organisasi perangkat Daerah, yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya Bumdes dan terdatanya jumlah pelaku usaha ekonomi masyarakat.
2. Melakukan pembinaan Posyantek, Posyantek yang aktif dalam pemanfaatan TTG dan Inovasi TTG yang dilombakan.
3. Melaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang se Kabupaten Tanah Laut, Rakor, Lomba, dan Pembinaan yang dilaksanakan oleh PKK dan Pembinaan P3MD.
4. Mengidentifikasi dan inventarisasi Lembaga Adat.
5. Melaksanakan sosialisasi Lembaga Adat Desa di 11 Kecamatan.
6. Membentuk Lembaga Adat Desa.
7. Melakukan Inventarisasi Penggunaan Lahan (IPL) desa eks. Transmigrasi
8. Melakukan pembinaan terhadap BKAD
9. Melaksanakan Bimtek Profile Desa.
10. Melaksanakan Bimtek/Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Melakukan Bimtek Penataan Administrasi Desa.
12. Melaksanakan Bimtek Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
13. Melaksanakan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa.
14. Melaksanakan pembentukan Desa Berciri Khas

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- **Ringkasan Eksekutif**, Ringkasan garis besar ruang lingkup muatan lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- **Bab I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, terdiri dari VISI, MISI, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) 2020, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, terkait dengan Akuntabilitas kinerja organisasi maupun Akuntabilitas Keuangan.
- **BAB IV Penutup**, dalam Bab ini memuat ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan strategi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- **Lampiran Lampiran**
  - IKU
  - Pernyataan Perjanjian Kinerja
  - Cascading/Pohon Kinerja
  - Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
  - Monev Renstra
  - Matrik Keselarasan



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun untuk memenuhi ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Beberapa Kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun Berikutnya

Disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukkandan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat disusun dengan lebih baik

Mudah-mudahan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut ini dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan LAKIP ini di ucapkan Terima Kasih.

Pelaihari, Januari 2022  
Kepala Dinas DPMD Kabupaten Tanah Laut



H. Bambang Kusudarisman, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19680818 199010 1 003

**Ringkasan**

**Eksekutif**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 Memiliki Visi yaitu : **“Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI (BERkarya, INovasi, TERTata, Religius, AKtual dan SInergi)”** yang Mana Visi tersebut Akan diwujudkan Melalui Misi yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Tahun 2021. Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi tersebut diatas, pada saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Amanat Kinerja yang telah ditetapkan melalui Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta target yang terukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat Ukur Guna tercapainya sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan yang perlu terus dipelihara dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut



H. Bambang Kusudansman, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19680818 199010 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI... ..	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi .....	3
C. Isu strategis.....	5
D. Produk dan Layanan .....	6
E. Sistematika Penyajian .....	16
<b>BAB II   PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Visi.....	18
B. Misi .....	15
C. Tujuan dan Sasaran Strategi.....	20
D. Indikator Kinerja Utama.....	21
E. Perjanjian Kinerja.....	23
F. Program dan Kegiatan.....	31
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>53</b>
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi. ....	53
1. Sasaran RPJMD.....	64
2. Eselon II ( Kepala Dinas ).....	79
3. Eselon III ( Sekretaris ).....	94
1). Eselon IV ( Kasubbag Umum Kepegawaian).....	98
2). Eselon IV ( Kasubbag Perencanaan dan keuangan ).....	103
4. Eselon III ( Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat).....	107
1). Eselon IV ( Kasi Bina Pemberdayaan Ekonomi Usaha Masyarakat.....	111
2). Eselon IV (Kasi Bina Pemberdayaan Sumber Daya alam & TTG.....	121
3). Eselon IV ( Kasi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat.....	129

5. Eselon III ( Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	141
1). Eselon IV ( Kasi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.....	143
2). Eselon IV (Kasi Bina Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.....	148
3). Eselon IV ( Kasi Pembinaan Pengelolaan dan Aset Desa....	153
6. Eselon III ( Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan.....	157
1). Eselon IV (Kasi Bina Bina Pengembangan Kawasan).....	161
2). Eselon IV (Kasi Bina Data Profil Desa).....	166
3). Eselon IV (Kasi Bina adat dan budaya).....	169
B. Akuntabilitas Keuangan	191
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021.....	191
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.....	192
3. Perbandingan Program dan Kegiatan tahun 2020 dan 2021....	199
<b>BAB IV      PENUTUP.....</b>	<b>200</b>
A. Kesimpulan.....	200
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	201

## **LAMPIRAN**

1. IKU
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan
3. Cascading/Pohon Kinerja
4. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
5. Monev Renstra
6. Matrik Keselarasan

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. VISI

***“Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI (BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, AKtual dan SInergi)”***

##### Penjelasan Visi:

Sebagai Penggerak Utama terkandung makna bahwa DPMD dengan keunggulan (advantage) yang dimilikinya memposisikan diri (positioning) sebagai instansi terdepan dan memiliki kemampuan untuk mensinergikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat. Keunggulan dimaksud berkaitan dengan substansi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMD memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh instansi lain.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Tanah Laut menggunakan pendekatan komprehensif/holistik dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya menggunakan pendekatan sektoral.

Keunggulan lain yang dimiliki DPMD adalah pengalaman empiris-historis pada saat melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat desa yang esensinya setara dengan tugas pemberdayaan masyarakat.

Memposisikan DPMD sebagai penggerak yang dapat mendorong dan memotivasi seluruh aparat DPMD untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya serta tertantang untuk konsisten mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan dapat diterima oleh stakeholder pemberdayaan masyarakat. Kata Terwujudkan, mengandung esensi adanya komitmen DPMD untuk melakukan upaya-upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Masyarakat Berdaya, memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya dengan berbasis budaya. Kondisi ini sebagai kondisi positif yang mampu memberikan kontribusi kepada upaya mewujudkan Tanah Laut sejahtera. Tanah Laut Sejahtera, mengandung makna suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat Tanah Laut mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar kehidupannya, terutama aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didasari hubungan sosial yang berbudaya.

## B. MISI

1. Berkarya Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, Sosial dan budaya
2. Menciptakan Inovasi di segala Sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan Industri Kreatif.
3. Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik ( Good Governance)
4. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas religius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
5. Membangun Sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut memiliki peran dalam pencapaian terhadap :

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1. Misi ke- 2 (dua), yakni</b>      | : | Menciptakan Inovasi di segala Sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan Industri Kreatif.                                    |
| - Tujuan ke 2.2                        | : | Peningkatan Inovasi di Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif.   |
| - Sasaran ke 2.2.1                     | : | Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam Perekonomian.   |
| <br><b>2. Misi ke- 3 (tiga), yakni</b> | : | <br>Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).  |
| - Tujuan ke 3.1                        | : | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi. |
| - Sasaran ke 3.1.1                     | : | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik.  |
| Indikator Sasaran                      | : | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan yang Tertib.                |
| - Sasaran ke 3.1.2                     | : | Meningkatnya Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  |

- 3. Misi ke- 5 (lima), yakni** : Membangun Sinergitas yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Tujuan ke 5.1 : Peningkatan Kinerja Pembangunan yang Berkualitas Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya (Pembangunan Inklusif).
  - Sasaran ke 5.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.  
Indikator Sasaran : Cakupan Pembinaan Kelompok PKK.
  - Tujuan ke 5.5 : Peningkatan Upaya Membangun Desa, Menata Kota.
  - Sasaran ke 5.5.1 : Meningkatnya Desa Membangun.
  - Indikator Sasaran : Persentase Klasifikasi Status Desa

### C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

**Tujuan** adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, Tujuan di ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tujuan dan Indikator tujuan yang ingin dicapai dalam bidang Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yakni :

1. Menciptakan Inovasi di segala Sendi Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif ( **Misi 2** )

Indikator Tujuan :

- a. Terbentuk dan berkembangnya teknologi tepat guna di masyarakat, dengan terbentuknya Pos Pelayanan Tekonogi Tepat Guna (Posyantek TTG) didesa akan menumbuhkan rasa inovatif dalam menciptakan sebuah alat yang dapat dikembangkan oleh masyarakat yang nantinya akan menumbuhkan perekonomian didesa dan alat tersebut mempunyai mamfaat bagi orang banyak yang nantinya akan bernilai ekonomis.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi ( **Misi 3** )
  3. Peningkatan Kinerja Pembangunan yang Berkualitas Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya (Pembangunan Inklusif). ( **Misi 5** )

Indikator Tujuan :

- a. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui tumbuh dan berkembangnya industri kerajinan rumah tangga dalam pemberdayaan PKK, melalui kegiatan pelatihan (pembuatan sasirangan, pembuatan kerajinan tangan, dll) maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten serta pembinaan dan lomba-lomba yang dilaksanakan dikecamatan maupun desa-desa sehingga masyarakat desa akan menjadi mandiri dalam membuat sebuah usaha maupun menciptakan terampilan lainnya dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga.
4. Peningkatan Upaya Membangun Desa Menata Kota ( **Misi 5** )

Indikator Tujuan :

- a. Indeks Desa Membangun.



## SASARAN STRATEGIS

**Sasaran Strategis** adalah hasil yang akan dicapai oleh Instansi Pemerintah dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan, adapun sasaran bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

“ Meningkatkan Klasifikasi Status Desa “

Indikator sasaran : Persentase Klasifikasi status Desa

Selanjutnya akan diuraikan mengenai tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Upaya Membangun Desa, Menata Kota	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	20%	20%	20%	20%

#### **D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sasaran target indikator kinerja utama adalah sasaran yang terkait dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akutabilitas kinerja.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	Sasaran pada indikator ini dimaksudkan untuk meningkatkan status desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : $\frac{\text{Jumlah Desa yang naik Ststusnya}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	DPMD Kabupaten Tanah Laut	DPMD Kabupaten Tanah Laut

**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Tanah Laut 2019 – 2023 dapat dilihat pada  
tabel berikut :**

Tujuan	Indikator Tujuan	Kon disi awal	Target Kinerja 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target Kinerja Sasaran				
		2019				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan upaya membangun desa, menata kota	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	100 %	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	0%	20%	20%	20%	20%	20%

#### **E. PERJANJIAN KINERJA 2021**

Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, maka setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun “Penetapan Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur
2. Komitmen anatara dua pihak penerima dengan pemberi amanah
3. Penilaian keberhasilan / kegagalan suatu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

**Tabel I**

**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	Kepala Dinas
2	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Persentase sarana prasarana yang terpenuhi dengan baik	100%	Sekretaris
3	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik	100%	Sekretaris
4	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	Sekretaris
5	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan & kinerja keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	Sekretaris
6	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan, pelaporan	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BB	Sekretaris
7	Meningkatnya ekonomi desa	Persentase usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif dan Persentase pemetaan dan pendataan usaha ekonomi didesa	100%	Kabid Pemberdayaan Masyarakat

8	Meningkatnya pelayanan posyantek dalam pemanfaatan sumber daya alam	Persentase posyantek yang terbentuk dan aktif	100%	Kabid Pemberdayaan Masyarakat
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase terselenggaranya musyawarah desa	100%	Kabid Pemberdayaan Masyarakat
10	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	40%	Kabid Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan
11	Meningkatnya kualitas data desa	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa	40%	Kabid Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan
12	Meningkatnya kemampuan pengurus Lembaga Adat Desa	Persentase lembaga adat desa yang dibina	40%	Kabid Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan
13	Meningkatnya administrasi desa	Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik	100%	Kabid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan
14	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, Renja Perubahan dan Renstra)	3 Dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
15	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD/LKPJ)	2 Dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

16	Melaksanakan Penyusunan SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP SKPD ( Pohon Kinerja, IKU dan PK )	3 Dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
17	Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (bulanan, triwulan, semesteran dan laporan keuangan akhir	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan (Dokumen Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran, Laporan Keuangan Pertriwulan, Laporan Keuangan semesteran, CALK)	4 Dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
18	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, SKPD	Jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	990 orang/kali, 11 kecamatan, 19 jenis dan 6 orang	Kasubag Umum dan Kepegawaian
19	Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dan kualitas SDM SKPD	Jumlah sarana prasarana dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	1 jenis, 1 jenis, 1 paket, 1 paket, 55 orang/kali, 55 orang/kali dan 2 jenis	Kasubag Umum dan Kepegawaian
20	Melaksanakan penyebaran informasi pembangunan SKPD	- Jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan - Jumlah pembuatan website	1 paket  1 paket	Kasubag Umum dan Kepegawaian
21	Melakukan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	Jumlah desa yang mendapatkan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	26 desa	Kasi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
22	Melaksanakan Pembinaan TMMD	Jumlah pelaksanaan pembinaan TMMD	1 desa	Kasi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

23	Melaksanakan rakor posyandu	Jumlah pelaksanaan rakor Posyandu	1 kali	Kasi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
24	Melaksanakan pendataan System Informasi Posyandu	Jumlah pendataan system informasi posyandu	130 desa	Kasi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
25	Memantau pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	147 Kelompok Organisasi Wanita	Kasi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
26	Memantau pelaksanaan musyawarah desa	Memantau jumlah desa yang melakukan musyawarah desa	50 desa	Kasi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
27	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	1 kali	Kasi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
28	Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	130 Desa	Kasi Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
29	Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan seksi bina PUEM	Jumlah melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan seksi Bina PUEM	130 Desa	Kasi Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
30	Melakukan fasilitasi pembentukan BUMDesa	Jumlah Bumdesa yang difasilitasi pembentukannya	20 Desa	Kasi Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat



31	Melaksanakan pendataan usaha didesa	Jumlah pelaksanaan pendataan usaha ekonomi desa	2 Kecamatan	Kasi Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
32	Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga kemasyarakatan lainnya	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga lainnya	LKD 130 Desa , KPMD dan KPSPAM	Kasi Bina Sumber Daya Alam dan TTG
33	Melaksanakan pendokumentasi kegiatan SDA dan TTG	Jumlah pendokumentasian kegiatan SDA dan TTG	65 alat teknologi tepat guna	Kasi Bina Sumber Daya Alam dan TTG
34	Melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi Posyantek	10 kali	Kasi Bina Sumber Daya Alam dan TTG
35	Melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan kelembagaan PosyantekDes	Jumlah pelaksanaan pelatihan TTG serta penguatan Kelembagaan PosyantekDes	1 kali	Kasi Bina Sumber Daya Alam dan TTG
36	Melaksanakan rembuk posyantek	Jumlah pelaksanaan rembuk posyantek	1 kali	Kasi Bina Sumber Daya Alam dan TTG
37	Melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG	Jumlah melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG	1 kali	Kasi Bina Sumber Daya Alam dan TTG
38	Melaksanakan keikutsertaan gelar TTG Tingkat Nasional	Jumlah keikutsertaan gelar TTG Tk. Nasional	1 Kali	Kasi Bina Sumber Daya Alam dan TTG
39	Melakukan pembinaan pengurus lembaga adat desa	Jumlah pengurus lembaga adat yang dibina	130 pengurus LAD	Kasi Bina Adat dan Budaya

40	Melaksanakan bimtek pengelolaan data desa	Jumlah aparat desa yang mengikuti bimtek pengelolaan data desa	130 aparat desa	Kasi Bina Data dan Profil Desa
41	Melakukan pendampingan penyusunan profil desa	Jumlah desa yang menyusun profil desa sesuai dengan ketentuan	130 desa	Kasi Bina Data dan Profil Desa
42	Melaksanakan fasilitasi untuk pembentukan BUMDesa bersama	Jumlah BUMDesa yang mengikuti sosialisasi pembentukan BUMDesa bersama	2 kecamatan sosialisasi, 2 desa Eks. Transmigrasi	Kasi Bina Pengembangan Kawasan
43	Melakukan inventarisasi kepemilikan lahan eks. Pemukiman Transmigrasi (UPT)	Jumlah dokumen inventarisasi kepemilikan lahan eks. Unit Pemukiman Transmigrasi ( UPT )		Kasi Bina Pengembangan Kawasan
44	Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan Keuangan desa	1560 orang	Kasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa
45	Melakukan pembinaan pengelolaan aset desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan aset desa		Kasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa
46	Melakukan pembinaan penataan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terbina	520 orang	Kasi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
47	Melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa	-Jumlah desa yang ditetapkan dan ditegaskan batas desa -Jumlah desa yang ditata kelambagaan desanya	4 desa  130 desa	Kasi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

48	Melakukan fasilitasi pilkades	Jumlah terpilih dan dilantiknya kepala desa	26 kepala desa	Kasi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
49	Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang telah dibina	260 orang	Kasi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dan Kelurahan
50	Melaksanakan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang telah dibina	390 orang	Kasi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dan Kelurahan
51	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	11 desa 1 kelurahan	Kasi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dan Kelurahan

## F. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pagu anggaran sebesar **Rp. 17.913.929.343** yang terdiri dari pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (gaji dan Tunjangan) **Rp. 6.450.310.202** dan Belanja Tidak Langsung Sebesar **Rp. 11.463.619.141** untuk 5 (Lima) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan dengan realisasi belanja Sebesar **70 %** dengan Realisasi Kinerja/Fisik dengan Persentase 80,81 %, adapun Rincian Program dan Alokasi Anggaran dapat dilihat pada Tabel

### Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021

NO	PROG RAM	ALOKASI	REALISASI (Rp)
A.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>6.450.310.202,-</b>	<b>4.190.388.206,-</b>
	Belanja Pegawai	6.450.310.202,-	4.190.388.206,-
B	<b>Belanja Langsung</b>	<b>11.463.619.141,-</b>	<b>8.307.868.278,-</b>

Belanja langsung Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 11.463.619.141,-** dengan **realisasi anggaran Rp. 8.307.868.278,-** dengan Program sebanyak 5 (lima) ,10 (sepuluh) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan yaitu :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
  - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
  - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**B. Program Penataan Desa**

**1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa

**C. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

**1. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa**

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

**D. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

**1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- f. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- h. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa
- i. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
- j. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- k. Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

**E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

**1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- c. Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan dinilai, dianalisis dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### **A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI**

Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator disajikan pada tabel pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tahun 2021.

Capaian indikator IKU ini untuk tahun 2021 ini merupakan capaian tahun kedua dalam Renstra Tahun 2018 – 2023 ( RENSTRA Tahun ke 2). Hal ini akan menjadi parameter keberhasilan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

## SASARAN RPJMD

<b>VISI</b>	<b>: <i>Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi</i></b> * Berkarya * Inovasi * Tertata * Religius * Aktual * Sinergi		
<b>MISI 5</b>	Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan Upaya membina Desa dan Menata Kota	Indeks Desa Membangun	1. Mendorong tertib administrasi dalam Pemerintahan Desa	1. Pembinaan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
		2. Mendorong partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa	2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
		3. Mengoptimalkan peran aparatur baik di pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan	3. Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
		4. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan	
		5. Mengoptimalkan peran lembaga perekonomian desa dalam meningkatkan perekonomian desa	4. Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa
		6. Mendorong tertib administrasi pertanahan kawasan perdesaan	5. Pembinaan terhadap pemanfaatan lahan kawasan perdesaan
		7. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kawasan perdesaan	6. Monitoring dan Evaluasi terhadap lahan kawasan perdesaan



Tabel

Realisasi Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	30,77%	128%
2	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Persentase sarana prasarana yang terpenuhi dengan baik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan & kinerja keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%

6	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan, pelaporan	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BB	C	50%
7	Meningkatnya ekonomi desa	Persentase usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif dan Persentase pemetaan dan pendataan usaha ekonomi di desa	100%	100%	100%
8	Meningkatnya pelayanan posyanteK dalam pemanfaatan sumber daya alam	Persentase posyanteK yang terbentuk dan aktif	100%	100%	100%
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase terselenggaranya musyawarah desa	100%	100%	100%
10	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	40%	40%	100%
11	Meningkatnya kualitas data desa	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa	40%	40%	100%
12	Meningkatnya kemampuan pengurus Lembaga Adat Desa	Persentase lembaga adat desa yang dibina	40%	40%	100%
13	Meningkatnya administrasi desa	Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik	100%	100%	100%

14	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, Renja Perubahan dan Renstra)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
15	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD/LKPJ)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
16	Melaksanakan Penyusunan SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP SKPD (PohonKinerja, IKU dan PK )	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
17	Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (bulanan, triwulan,semesteran dan laporan keuangan akhir	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan (Dokumen Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran, Laporan Keuangan Pertriwulan, Laporan Keuangan semesteran, CALK)	4 Dokumen	4 Dokumen  -  -	100%
18	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, SKPD	Jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	990 orang/kali, 11 kecamatan, 19 jenis dan 6 orang	564 orang/kali, 11 kec, 19 jenis dan 6 orang	57%
19	Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dan kualitas SDM SKPD	Jumlah sarana prasarana dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	1 jenis, 1 jenis, 1 paket, 1 paket, 55 orang/kali, 55 orang/kali dan 2 jenis	2 jenis , 2 paket, 30 orang/kali dan 2 jenis	100%

20	Melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan SKPD	- Jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan - Jumlah pembuatan website	1 paket  1 paket	1 paket  -	100%  Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya COVID
21	Melakukan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	Jumlah desa yang mendapatkan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	26 desa	25 desa	96%
22	Melaksanakan Pembinaan TMMD	Jumlah pelaksanaan pembinaan TMMD	1 desa	1 desa	100%
23	Melaksanakan rakor posyandu	Jumlah pelaksanaan rakor Posyandu	1 kali	1 kali	100%
24	Melaksanakan pendataan System Informasi Posyandu	Jumlah pendataan system informasi posyandu	130 desa	130 desa	100%
25	Memantau pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	147 Kelompok Organisasi Wanita	147 Kelompok Organisasi Wanita	100%
26	Memantau pelaksanaan musyawarah desa	Memantau jumlah desa yang melakukan musyawarah desa	50 desa	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena COVID
27	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan	1 kali	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena COVID

		masyarakat desa			
28	Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	130 Desa	130 Desa	100%
29	Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan seksi bina PUEM	Jumlah melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan seksi Bina PUEM	130 Desa	130 Desa	100%
30	Melakukan fasilitasi pembentukan BUMDesa	Jumlah Bumdesa yang difasilitasi pembentukannya	20 Desa	100 Bumdesa	500%
31	Melaksanakan pendataan usaha didesa	Jumlah pelaksanaan pendataan usaha ekonomi desa	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%
32	Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga kemasyarakatan lainnya	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga lainnya	LKD 130 Desa , KPMD dan KPSPAM	LKD 130 Desa , KPMD dan KPSPAM	100%
33	Melaksanakan pendokumentasi kegiatan SDA dan TTG	Jumlah pendokumentasian kegiatan SDA dan TTG	65 alat teknologi tepat guna	65 alat teknologi tepat guna	100%
34	Melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi Posyantek	10 kali	10 kali	100%

35	Melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan kelembagaan PosyantekDes	Jumlah pelaksanaan pelatihan TTG serta penguatan Kelembagaan PosyantekDes	1 kali	10 desa	100%
36	Melaksanakan rembuk posyantek	Jumlah pelaksanaan rembuk posyantek	1 kali	1 kali	100%
37	Melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG	Jumlah melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG	1 kali	1 kali	100%
38	Melaksanakan keikutsertaan gelar TTG Tingkat Nasional	Jumlah keikutsertaan gelar TTG Tk. Nasional	1 Kali	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena COVID
39	Melakukan pembinaan pengurus lembaga adat desa	Jumlah pengurus lembaga adat yang dibina	130 pengurus LAD	130 pengurus LAD	100%
40	Melaksanakan bimtek pengelolaan data desa	Jumlah aparat desa yang mengikuti bimtek pengelolaan data desa	130 aparat desa	130 aparat desa	100%
41	Melakukan pendampingan penyusunan profil desa	Jumlah desa yang menyusun profil desa sesuai dengan ketentuan	130 desa	130 desa	100%
42	Melaksanakan fasilitasi untuk pembentukan BUMDesa bersama	Jumlah BUMDesa yang mengikuti sosialisasi pembentukan BUMDesa bersama	1 kecamatan sosialisasi, 7 BKAD Rakor Kabupaten dan 2 desa Eks. Transmigrasi	1 kecamatan sosialisasi, 7 BKAD Rakor Kabupaten dan 2 desa Eks. Transmigrasi	100%

43	Melakukan inventarisasi kepemilikan lahan eks. Pemukiman Transmigrasi (UPT)	Jumlah dokumen inventarisasi kepemilikan lahan eks. Unit Pemukiman Transmigrasi ( UPT )	1 buku	1 buku	100%
44	Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan Keuangan desa	1560 orang	1454 orang	93%
45	Melakukan pembinaan pengelolaan aset desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan aset desa			
46	Melakukan pembinaan penataan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terbina	520 orang	260 orang	50%
47	Melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa	-Jumlah desa yang ditetapkan dan ditegaskan batas desa  -Jumlah desa yang ditata kelambagaan desanya	4 desa  130 desa		Kegiatan tidak dilaksanakan karena focus pada pilkades
48	Melakukan fasilitasi pilkades	Jumlah terpilih dan dilantiknya kepala desa	26 kepala desa	26 kepala desa	100%
49	Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang telah dibina	260 orang	260 orang	100%

50	Melaksanakan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang telah dibina	390 orang	390 orang	100%
51	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	11 desa 1 kelurahan	11 desa 1 kelurahan	100%



## 1. Sasaran RPJMD

### Indikator Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa Kategori Maju	20%	20%	100%
		2	Jumlah Desa di Bina Berciri Khas	5 Desa	5 Desa	100%
						<b>100%</b>

### Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2021		
			2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa Kategori Maju	%	19,23	21,54	24	33,08	128%
2	Jumlah Desa di Bina Berciri Khas	Desa	5	5	5	6	120%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							124%

#### a. Persentase desa kategori maju

Persentase Desa Kategori Maju Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 terealisasi sebesar 33,07% dari target 24%, sehingga capaian kinerja persentase desa kategori maju 128%.

Perhitungan persentase desa kategori maju diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Persentase desa kategori maju

=  $\frac{\text{Jumlah desa kategori maju}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$

=  $\frac{43 \text{ Desa}}{130 \text{ Desa}} \times 100\%$

=  $\frac{43}{130} \times 100\%$

= 33,08%

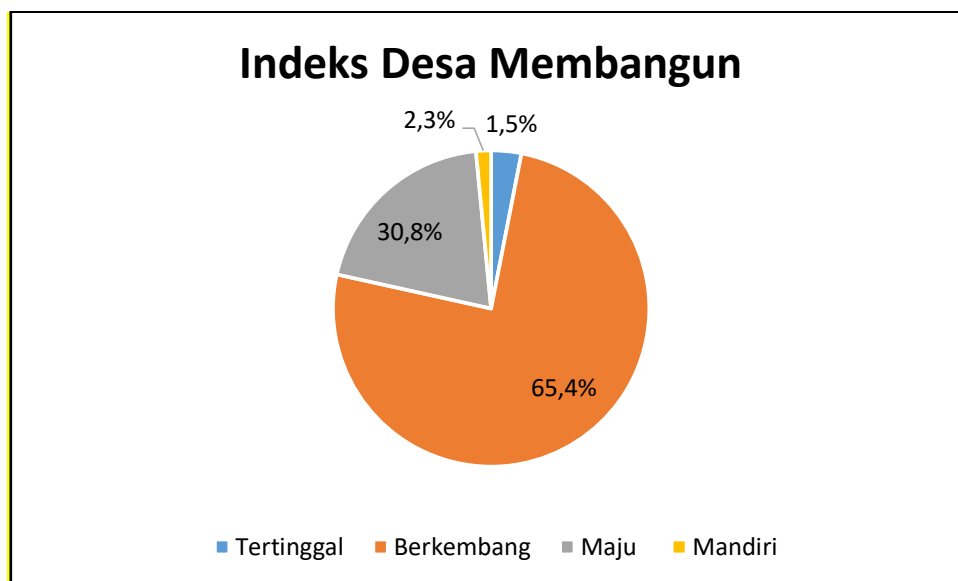
Tabel  
Klasifikasi Status Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut Tahun  
2021

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	STATUS IDM				
			SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	TAKISUNG	12	-	-	9	3	-
2	JORONG	11	-	-	7	3	1
3	PELAIHARI	15	-	-	10	5	-
4	KURAU	11	-	-	8	3	-
5	BATI-BATI	14	-	-	10	4	-
6	PANYIPATAN	10	-	-	6	4	-
7	KINTAP	14	-	-	7	6	1
8	TAMBANG ULANG	9	-	-	8	1	-
9	BATU AMPAR	14	-	-	6	7	1
10	BAJUIN	9	-	-	5	4	-
11	BUMI MAKMUR	11	-	2	9	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>130</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>40</b>	<b>3</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masih ada 2 Desa kategori tertinggal, 85 Desa kategori berkembang, 40 Desa kategori maju dan 3 Desa kategori mandiri dari total 130 desa se Kabupaten Tanah Laut.

Grafik 28 : Indeks Desa Membangun



Persentase Desa Kategori Maju Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 terealisasi sebesar 30,77%, mengalami peningkatan sebesar 9,23% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 21,54%. Untuk tahun 2020 terdapat 2 desa mandiri dan 4 desa tertinggal sedangkan di tahun 2021 terdapat 3 desa dengan kategori mandiri dan masih ada 2 desa dengan kategori tertinggal.

Tabel 110

Kriteria Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 – 2021

No	Kriteria IDM	Jumlah Desa	
		2020	2021
1	Sangat Tertinggal	0	0
2	Tertinggal	4	2
3	Berkembang	98	85
4	Maju	26	40
5	Mandiri	2	3
Jumlah		130	130

Indikator yang digunakan dalam menetapkan status desa dalam indeks desa membangun adalah IKS : Indeks Ketahanan Sosial, IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi, IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan ( Ekologi). Sedangkan klasifikasi status desa dibedakan menjadi lima (5) status, yakni : (i) Desa sangat tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

Tabel 112. Klasifikasi Desa

No	Status Desa	Nilai Batas
1.	Sangat tertinggal	$\leq 0,4907$
2.	Tertinggal	$> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$
3.	Berkembang	$> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$
4.	Maju	$> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$
5.	Mandiri	$> 0,8155$

Ada 3 pendekatan yang diambil oleh Kementerian Desa PDTT untuk mendorong desa semakin lebih cepat dalam melaksanakan pembangunan. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbanyak kesempatan dan pilihan

masyarakat desa dalam upaya menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva. Sampai saat ini masalah yang dihadapi masyarakat desa adalah ketidakberdayakan dan marginalisasi. Masalah inilah yang menjadi faktor utama penyebab kemiskinan di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu diharapkan dengan Jaringan Komunitas Desa ini mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan Lokal Desa.

Kedua, Lumbung Ekonomi Desa. Desa sebagai jenis entitas wilayah terkecil. Dalam suatu Negara, memiliki potensi sumber daya yang sangat beragam. Ketika potensi tersebut mampu untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa sendiri maka akan menjadi lumbung komoditas ekonomi. Pengembangan lumbung ekonomi tidak akan pernah lepas dengan masalah modal, jaringan dan informasi. Oleh karena itu lembaga ekonomi yang dibentuk di desa harusnya sudah mempunyai kapasitas dan kualitas yang sudah mumpuni. Dalam Konteks ini BUMDesa ( Badan Usaha Milik Desa ) sebagai penggerak perekonomian harus mampu dan tanggap dengan kesempatan dan peluang ekonomi yang bias dikembangkan. Ketiga, Lingkaran Budaya Desa. Budaya desa merupakan ruh keterkaitan emosional warga yang terbentuk dari kebersamaan persaudaraan, kekerabatan dan kolektivitas yang mengakar lama dalam masyarakat. Budaya desa yang seperti ini akan mampu mengarahkan, membimbing secara kolektif untuk tetap pada jalur dan tujuan program pembangunan. Norma dan nilai budaya desa yang telah ada sejak lama secara otomatis akan mengontrol program tersebut hingga menghasilkan kemajuan hingga sampai pada kesejahteraan masyarakat. Tiga pendekatan inilah yang kemudian menghasilkan tiga kategori dalam melakukan penilaian keberhasilan program pembangunan desa atau yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi (Lingkungan).

Tabel 113  
Klasifikasi Status Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KRITERIA IDM	JUMLAH DESA
1	Sangat Tertinggal	0
2	Tertinggal	2
3	Berkembang	85
4	Maju	40
5	Mandiri	3
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>

Derap pembangunan di wilayah perdesaan di Kabupaten Tanah Laut terus melaju pesat. Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut mulai terus ditingkatkan dari tahun 2020 sampai sekarang, khususnya mengenai perkembangan kemajuan di 130 Desa. Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, maka diperlukan ketersediaan data dasar Pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana ketentuan Permendes PDTT-RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Target kenaikan status Desa selain didasarkan pada capaian prestisius tahun lalu, juga dikarenakan masifnya pembangunan di seluruh Desa di Kabupaten Tanah Laut. Baik yang mempergunakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta berbagai sumber pendapatan lainnya.

Dari 130 desa di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari 11 Kecamatan, pada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut masih memiliki Desa Tertinggal, yakni sebanyak 4 Desa (3,07 persen) tapi pada tahun 2021 Desa Tertinggal berkurang menjadi 2 Desa (1,5 persen). Kemudian, Desa Berkembang pada tahun 2020 sebanyak 98 Desa (75,38 persen) turun menjadi 85 Desa (65,38 persen) pada tahun 2021. Desa Maju pada tahun 2020 sebanyak 26 Desa (20 persen) naik menjadi 40 Desa (30,77 persen) pada tahun 2021. Dan Desa Mandiri pada tahun sebelumnya ada 2 Desa (1,54 persen) sekarang pada tahun 2021 menjadi 3 Desa (2,3 persen).

Komitmen dan kesungguhan Pemerintah pada semua tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dan tidak ketinggalan partisipasi para Pendamping Desa serta semua pihak yang terkait. Karena itu, sinergi harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga status Desa Tertinggal tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Laut ini, semuanya sudah naik menjadi Desa Berkembang, Maju dan Desa Mandiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu program unggulan Pemeirntah Kabupaten Tanah Laut, sehingga banyak upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Dengan peningkatan ADD tersebut di tahun 2020 dan 2021 Desa dapat membangun desa dalam segala dimensi, baik itu pembangunan infrastruktur (jalan desa, saluran irigasi, jalan pertanian) yang memudahkan akses masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan pagelaran budaya di desa, peningkatan kualitas sumberdaya manusia desa melalui kegiatan pelatihan kepada pemuda di desa misalnya tata rias, memasak, perbengkelan dan lain-lain.
2. Bupati mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten sesuai dengan amanat Permendagri nomor 35 tahun 2018 tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimulai pada tahun 2019 untuk melaksanakan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi keuangan dan kinerja, dan di tahun 2019 telah dilakukan audit kepada 109 Desa dari total 130 Desa dan di tahun 2020 telah dilaksanakan audit kepada 29 Desa dikarenakan adanya pandemi Covid 19.

Kegiatan-kegiatan pengawasan dalam rangka pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:

- a. Pengawasan kebijakan pengelolaan APBDesa yang lebih mengutamakan pada pemberdayaan tenaga kerja dan potensi lokal secara mandiri dalam pengerjaan kegiatan pembangunan dengan fokus pada aspek efektivitas dan efisiensi yang menggunakan anggaran dana desa.
  - b. Pengawasan pengelola administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan BPD dalam pengelolaan APBDesa sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara/daerah.
  - c. Pemberian sosialisasi dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Perangkat dan BPD Desa.
  - d. Melakukan Reviu penyaluran dan Penggunaan APBDesa setiap Triwulan.
  - e. Pengawasan pengelola Penatausahaan Aset Desa.
  - f. Pengawasan terhadap efektifitas kinerja Perangkat Desa, Penggunaan tenaga kerja, organisasi desa yang telah dibentuk.
  - g. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
  - h. Melakukan koordinasi terhadap dugaan adanya penyelewengan dana desa dari masyarakat diantaranya dengan meminta hasil laporan audit dari Inspektorat.
3. Melalui Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan upaya sebagai berikut:
- a. Melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan SKPD lain (Forum SKPD) dalam rangka bersama-sama menjadikan desa-desa yang tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri yang merupakan sasaran dari forum ini sehingga semua program yang ada di masing-masing SKPD dapat bersinergi yang sudah barang tentu untuk peningkatan status desa tersebut.
  - b. Mengawal penggunaan ADD desa dengan melaksanakan monitoring serta evaluasi penggunaan DD dan ADD yang dikucurkan pemerintah pada desa-desa yang status desanya masih sangat tertinggal dan tertinggal apakah sudah sesuai dan mendukung dalam peningkatan status desanya.
  - c. Melakukan penguatan Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM dll) serta BumDes melalui kegiatan bimtek/pelatihan/pembinaan agar mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mendukung percepatan peningkatan status desa.
  - d. Melaksanakan pembinaan desa yang memiliki ciri khas untuk terus meingkatkan potensi desa melalui kerjasama dengan SKPD terkait, agar menumbuhkan usaha-usaha kecil di desa.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain terus melaksanakan kegiatan kegiatan yang baik yang telah dilaksanakan dan perbaikan-perbaikan yang masih dianggap kurang juga akan menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa yaitu meningkatkan keterpaduan , koordinasi, dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, terkait sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut.

b. Jumlah desa dibina berciri khas

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa, di Kabupaten Tanah Laut juga telah terbentuk Desa Berciri Khas. Desa Berciri Khas yaitu Desa yang memiliki karakteristik khusus yang dapat ditinjau dari aspek sosial budaya, masyarakat Desa setempat masih mempertahankan tradisi turun temurun dalam kehidupan sosial dan budaya. Sementara pada aspek geografi tergantung dari potensi alam tempat tinggal masyarakat Desa. Kebanyakan masih menggantungkan hidup dengan kondisi alam setempat sesuai potensi alamnya, misalnya daerah pesisir yang rata-rata adalah nelayan. Sedangkan warga yang hidup dipinggiran hutan akan mengandalkan potensi hutan setempat utk bertahan hidup. Sementara dari aspek SDM yaitu masyarakat Desa setempat memiliki keterampilan khusus sebagai mata pencaharian yang mana mereka hidup dari industri kerajinan atau Desa pengrajin dan rata-rata biasanya bersifat homogen. Jadi Desa Berciri Khas sesuai karakteristik desa masing-masing tersebut dengan potensi yang ada perlu digali, dipertahankan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa setempat dan sekaligus pelestarian alam dapat terjaga dengan baik.

Untuk desa yang dibina berciri khas dari 5 desa yang ditargetkan sudah terlaksana semua (bahkan ada penambahan 1 desa berciri khas lagi) yaitu dengan melaksanakan pembinaan terhadap desa yang berciri khas.

Jumlah desa dibina berciri khas tahun 2021 adalah sebanyak 6 desa. Berikut daftar desa dibina berciri khas tahun 2020 dan 2021.

No	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Desa Bukit Mulya Kecamatan Kintap	Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati
2	Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong	Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari
3	Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung	Desa Tanjung Kecamatan Bajuin
4	Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar	Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan
5	Desa Handil Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur	Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau
6		Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang

Berikut kegiatan koordinasi Desa Berciri Khas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2021 :

1. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Kepala SKPD/ yang mewakili, Enam Kecamatan yang ditunjuk berciri khas. Kecamatan tersebut memilih Desa yang mempunyai ciri khasnya.
2. Rapat koordinasi dan konsolidasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Bupati Tanah Laut, Kepala SKPD/ yang mewakili, Enam Kecamatan dan enam Kepala Desa yang ditunjuk berciri khas yaitu Desa Pandahan Kec. Bati-Bati, Desa Tungkaran Kec. Pelaihari, Desa Tanjung Kec. Bajuin, Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan, Desa Sungai Bakau Kec. Kurau dan Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang. Desa tersebut mempunyai adanya karakteristiknya masing-masing Desa, wisata, Kountur budaya dan alamnya.
3. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau, desa yang memiliki potensi alam pada bulan tertentu masyarakat berbondong-bondong melakukan aktivitas mencari pahat-pahat atau yang biasa disebut kerang bambu. Yang diputuskan dinamakan Kampung Pahat-Pahat. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, enam Kecamatan dan enam kepala Desa yang ditunjuk berciri khas dan dihadiri Kepala SKPD/ yang mewakili.
4. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati, lokasi yang bertepatan di pinggir jalan menuju arah Pelaihari – Banjarmasin banyak pengguna jalan yang singgah untuk beristirahat sambil menikmati jagung rebus manis. Yang diputuskan dinamakan Kampung Jagung. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, enam Kecamatan dan enam kepala Desa yang ditunjuk berciri khas dan dihadiri Kepala SKPD/ yang mewakili.



5. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan yaitu lebih unik lagi karena dengan keragaman yang seni budaya yang selalu di selenggarakan tiap ada kegiatan acara hajatan atau pada waktu tertentu yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Yang diputuskan dinamakan Kampung Kesenian Damuluk. Yang dihadiri oleh Bupati Kab. Tanah Laut yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah, enam Kecamatan dan enam kepala Desa yang ditunjuk berciri khas dan dihadiri Kepala SKPD/ yang mewakili.
6. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang yaitu dengan masyarakatnya usaha pengrajin pembuat sasirangan se Kabupaten Tanah Laut. Yang diputuskan dinamakan Kampung Sasirangan. Yang dihadiri oleh Bupati Kab. Tanah Laut / yang diwakili, enam Kecamatan dan enam kepala Desa yang ditunjuk berciri khas dan dihadiri Kepala SKPD/ yang mewakili.
7. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa yaitu sebagai Desa berciri khas "Dayak Biaju" yang mempunyai tarian adat budaya sering ditampilkan pada acara atau kegiatan pemerintahan seperti acara Kunjungan Kerja.
8. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang berciri khas di Desa Tungkaru Kecamatan Pelaihari dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu dimana lahan masyarakat banyak tumbuh pohon durian dengan rasa buah yang berkarakter pembeda dari durian ditempat lain, bahkan nanti akan ada agenda tahunan untuk memperkenalkan buah durian dari Desa Tungkaru dalam event khusus penampilan buah durian.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pembinaan desa di dukung oleh 1 Program dengan pagu Rp 7.178.890.554 dan realisasi sebesar Rp 5.525.255.378 atau sebesar 76,96 %.

## 2. Sasaran Eselon II (Kepala Dinas)

Tabel  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
tahun anggaran 2021

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Indeks Desa Membangun	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	20%	100%
	Rata-rata capaian				100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Klasifikasi Status Desa	25%	20%	20%	20%	20%	100%

### 1). Perbandingan Realisasi dengan Target

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### **“ Persentase Klasifikasi Status Desa “**

Sasaran pada indikator ini dimaksudkan untuk meningkatkan status desa dengan

Formulasi Penghitungan dalam indikator Kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang naik statusnya}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut untuk Persentase Klasifikasi Status Desa yang ditargetkan 20% karena tahun 2021 merupakan Kondisi tahun ketiga dari Target Renstra 5 Tahunan, dari target 20%

atau target yang direncanakan membentuk meningkatkan klasifikasi status desa dari 20% terealisasi sebesar 30% atau sebanyak 40 Desa. Hal ini didukung oleh Komitmen dan Niat Desa untuk meningkatkan klasifikasi status desa dengan menyesuaikan keadaan Potensial Desa dan beberapa kegiatan pendukung lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Melalui Program, kegiatan dan sub kegiatan.

## 2). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi kinerja tahun 2021 yang dicapai dengan perbandingan tahun 2020 terdapat perbedaan sebesar 5%, ini karena kenaikan klasifikasi status desa (semua kenaikan klasifikasi) yang pada tahun 2020 sebesar 25% sedangkan tahun 2021 sebesar 30%.

Sedangkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat kenaikan setiap tahunnya. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target sudah tercapai, sesuai dengan yang ditargetkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

REKAP INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2020 dan 2021  
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KRITERIA IDM	JUMLAH DESA	
		2020	2021
	Rata -Rata nilai IDM		
1	Sangat Tertinggal	0	0
2	Tertinggal	4	2
3	Berkembang	98	85
4	Maju	26	40
5	Mandiri	2	3
JUMLAH		130	130

Tabel  
STATUS IDM TAHUN 2021 KAB. TANAH LAUT

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	STATUS IDM				
			SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	TAKISUNG	12	-	-	9	3	-
2	JORONG	11	-	-	7	3	1
3	PELAIHARI	15	-	-	10	5	-
4	KURAU	11	-	-	8	3	-
5	BATI-BATI	14	-	-	10	4	-
6	PANYIPATAN	10	-	-	6	4	-
7	KINTAP	14	-	-	7	6	1
8	TAMBANG ULANG	9	-	-	8	1	-
9	BATU AMPAR	14	-	-	6	7	1
10	BAJUIN	9	-	-	5	4	-
11	BUMI MAKMUR	11	-	2	9	-	-
JUMLAH		130	-	2	85	40	3

### 3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2021 pencapaian yang dicapai Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk persentase klasifikasi status desa yang di targetkan sudah memenuhi target yaitu 20%. Secara umum klasifikasi status desa untuk tahun 2021 sudah ada 3 desa yang menjadi desa mandiri, jadi Indeks Desa Membangun (IDM) ini disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu proses dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa.

Keberhasilan ini dicapai dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari potensi desa yang diterbitkan Pusat Statistik, merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi social, ekonomi dan budaya.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk persentase klasifikasi status desa agar bias digunakan sebagai basis data pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

masuk dalam perumusan targetting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrument koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

### 3. Sasaran Eselon III (Sekretaris)

#### Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Sekretariat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase sarana prasarana yang terpenuhi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase perencanaan dan kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	B	BB	BB	BB	C	50%
	Rata-rata Capaian						95%

a). Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada tahun 2021 capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Sekretaris yang di capai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk persentase semua indikator yang bersangkutan mencapai 95%.

b). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi kinerja tahun 2021 yang dicapai dengan perbandingan tahun 2020 ada perbedaan. Karena untuk realisasi nilai SAKIP ada penurunan yang semula pada tahun 2020 mendapatkan nilai BB dan pada tahun 2021 mendapatkan nilai SAKIP C.

c). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2021 pencapaian yang dicapai Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk persentase sarana prasarana yang terpenuhi dengan baik, persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik, persentase perencanaan dan kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan, persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan dan Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditargetkan tidak memenuhi target yaitu 80% dari yang ditargetkan 100%. Hasil realisasi 80% yang didapatkan mendapat kendala pada penyajian data yang kurang lengkap, namun semua tersebut tidak mengurangi kinerja SKPD.

d). Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Adapun beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja untuk mencapai target yang ditentukan adalah :

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana prasarana	Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		451.077.360,-

	perkantoran				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.492.980,-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.568.610,-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.322.960,-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.939.730,-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.685.634,-
2	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		262.284.256,-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.617.600,-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.250.000,-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.416.656,-
3	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60.962.626,-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.242.026,-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.354.600,-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.771.400,-

				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.260.300,-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.568.300,-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.766.000,-
4	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan & kinerja keuangan SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.458.984.612,-
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	6.450.310.202,-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.616.600,-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.057.810,-
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan, pelaporan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.950.000,-

Dari semua program/kegiatan/sub kegiatan penunjang yang ada, ada satu kegiatan yaitu Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan, karena adanya covid-19. Sedangkan untuk kegiatan yang lain sudah terlaksana semua.



#### 4. Sasaran Eselon III (Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat)

##### Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya ekonomi desa	Persentase usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif dan Persentase pemetaan dan pendataan usaha ekonomi didesa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pelayanan posyanteK dalam pemanfaatan SDA	Persentase posyanteK yang terbentuk dan aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase terselenggaranya musyawarah desa	-	34%	96%	100%	96%	96%
		Rata-rata Capaian						98%

#### a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata Capaian Kinerja Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat telah terealisasi 100%. Dari 6 indikator kinerja, indikator Persentase usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif dan Persentase pemetaan dan pendataan usaha ekonomi didesa telah tercapai 100% dari target 100%, indikator Persentase posyanteK yang terbentuk dan aktif telah tercapai 100% dari target 100%, indikator Persentase terselenggaranya kegiatan

partisipasi masyarakat telah tercapai 96% dari target 100% (target manunggal tuntung pandang 26 desa sedangkan realisasi 25 desa), indikator Persentase PKK aktif telah tercapai 100% dari target 100%. Untuk 2 indikator yaitu Persentase LPM berprestasi dan Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat tidak terealisasi karena memang tidak ada kegiatan dan tidak dianggarkan pada tahun 2021.

b) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun 2020 yang terdiri dari 3 indikator Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif telah tercapai 100% pada tahun 2021 dan juga tahun 2020 sebelumnya. Pada indikator Persentase Posyantek yang terbentuk dan aktif telah tercapai 100% pada tahun 2021 dan juga tahun 2020 sebelumnya. Sedangkan pada indikator Persentase terselenggaranya musyawarah desa tidak terealisasi dikarenakan adanya refocusing. Sedangkan untuk tahun 2021 ada penambahan 3 indikator lagi yaitu indikator Persentase LPM berprestasi, indikator Persentase PKK aktif dan indikator Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan.

c) Analisis Peningkatan / Penurunan Kinerja

- Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif.

Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 ditargetkan mencapai angka 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif berada pada Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Usaha Masyarakat.

- Persentase Posyantek yang terbentuk dan aktif.

Persentase Posyantek yang terbentuk dan aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 ditargetkan mencapai angka 100%.

- Persentase terselenggaranya kegiatan partisipasi masyarakat.

Persentase terselenggaranya kegiatan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 terealisasi 96 % dari target 100%.

- Persentase LPM berprestasi.

Persentase LPM berprestasi di tahun 2021 tidak dilaksanakan karena tidak ada kegiatan yang dianggarkan.

- Persentase PKK aktif.

Persentase PKK aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 terealisasi 100% dari target 100%.

- Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat.

Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat di tahun 2021 tidak dilaksanakan karena tidak ada kegiatan yang dianggarkan.

Pencapaian atas semua target indikator ini tercapai atas kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut khususnya pada Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat.

d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ekonomi desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	25.367.200,-
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	234.095.116,-
2	Meningkatnya pelayanan posyantek dalam pemanfaatan sumber daya alam	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	312.488.806,-

			Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.310.417.880,-	
4	Persentase PKK aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	740.135.212,-	

			Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
--	--	--	--	--	--	--

1) Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Usaha Masyarakat

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	130 desa	130 desa	100%
2	Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan seksi bina PUEM	Jumlah melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Seksi Bina PUEM	130 desa	130 desa	100%
3	Melakukan fasilitasi pembentukan BUMDesa	Jumlah melakukan fasilitasi pembentukan BUMDesa	20 desa	20 desa	100%
4	Melaksanakan pendataan usaha didesa	Jumlah melaksanakan pendataan usaha ekonomi desa	2 kecamatan	2 kecamatan	100%
Rata-rata capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah melaksanakan			130 desa	130 desa	130 desa	100%

	koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat						
2	Jumlah melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Seksi Bina PUEM			130 desa	130 desa	130 desa	100%
3	Jumlah melakukan fasilitasi pembentukan BUMDesa	23 desa	21 desa	20 desa	20 desa	20 desa	100%
4	Jumlah melaksanakan pendataan usaha ekonomi desa	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	100%
	Rata-rata Capaian						100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata kinerja Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Usaha Masyarakat terealisasi 100% sesuai dengan target, hal ini dikarenakan semua indikator kinerja yang ada dilaksanakan sesuai harapan atau target yang diharapkan.

a) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (100%) dan tahun 2020 (67%), kegiatan pada tahun 2020 melebihi target hal ini disebabkan karena 1 indikator realisasinya melebihi target, sedangkan pada tahun 2021 sesuai dengan target yang telah diharapkan.

b) Analisis Peningkatan / Penurunan Kinerja

a. Jumlah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Tahun 2021 jumlah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada kendala yang dihadapi.

- b. Jumlah melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Seksi Bina PUEM

Tahun 2021 jumlah melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Seksi Bina PUEM terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada kendala yang dihadapi.

- c. Jumlah melakukan fasilitasi pembentukan BUMDesa

Tahun 2021 jumlah melakukan fasilitasi pembentukan BUMDesa terealisasi 100%.

- d. Jumlah melaksanakan pendataan usaha ekonomi desa

Tahun 2021 jumlah melaksanakan pendataan usaha ekonomi desa dilaksanakan sesuai target 100%.

c) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja  
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	234.095.116,-
2	Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan seksi bina PUEM	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	66.427.940,-

			Pelakunya Hukum Adat 1 yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
3	Melakukan fasilitasi pembentukan BUMDesa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	234.095.116,-
4	Melaksanakan pendataan usaha didesa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	66.427.940,-

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa

Dengan indikator keluaran jumlah badan usaha milik desa (Bumdesa) yang aktif target 5 Bumdesa dan terealisasi 100%, jumlah badan usaha milik desa (Bumdesa) yang terbentuk target 100 Bumdesa



dengan realisasi 100%, jumlah pelaksanaan bursa badan usaha milik desa (Bumdesa) target 1 kali dengan realisasi 100%, jumlah pelatihan peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik desa (Bumdesa) target 1 kali dengan realisasi 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 234.095.116,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.952.047,- atau 35,86. Realisasi keuangan yang rendah disebabkan karena pelaksana kegiatan mengurangi volume kegiatan dengan jumlah terbatas dalam pelaksanaan pelatihan maupun bursa bumdesa karena masih dalam kondisi covid 19.

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Dengan indikator keluaran jumlah kecamatan yang melakukan pemetaan usaha ekonomi ekonomi desa dengan target 2 kecamatan dengan realisasi 100%, jumlah terealisasinya pembuatan program database revisi database pemetaan usaha ekonomi masyarakat dengan target 1 program database dengan realisasi 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 66.427.940,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.931.700,- atau 78,18%

**Badan Usaha Milik Desa yang terbentuk**

NO KEC		NAMA DESA	NAMA BUMDES	Tanggal Pendirian	Jenis Usaha	Status
1		KEC. PELAIHARI				
	1	Ambungan	Kayangan Makmur	06 Juli 2015	Fotocopy & Laminating	Tidak
	2	Tampang	Amanah	10 Juni 2013	Penggemukan Sapi, Pengelolaan gedung olahraga	Aktif
	3	Telaga	Sejahtera Bersama	xx xxxx 2018	Penggemukan sapi, SPP	Aktif
	4	Bumi Jaya	Karya jaya	13 Januari 2016	Jasa, Pengelolaan Pasar Desa, SP, Perdagangan, pengelolaan obyek wisata	Aktif
	5	Panjaratan	Makmur Bersama	26 Juni 2019	Pariwisata, Saprodi, Penyewaan Tenda, Foto copy, ATK, Jual beli	Tidak

					Gabah, Pengelolaan air bersih	
	6	Kampung Baru	Karya Bersama	12 Oktober 2017	Pengadaan pupuk, Pangkalan gas, SP, Bulog	Aktif
	7	Panggung Baru	Gawi Manuntung	01 Juli 2019	Penggemukan Sapi, Penyewaaan Organ, Saprodi, SP	Tidak
	8	Sungai Riam	Riam Jaya Abadi	01 Juli 2019		
	9	Ujung Batu	Jaya Makmur Keramaian	01 Juli 2019		
	10	Sumber Mulia	Sumber Rezeki	01 Juli 2020		
	11	Tungkaran	Tungkaran Mandiri	14 Juli 2020		
<b>2</b>		<b>KEC. BAJUIN</b>				
	1	Tirta Jaya	Bina Bersama	24 Mei 2016	Kompos, material, sembako	Tidak
	2	Ketapang	Tunas Karya	25 Oktober 2016	sembako, material	Tidak
	3	Tebing Siring	Mugi Rahayu	18 Desember 2017	Jasa, Kerjasama pihak ke 3	Aktif
	4	Sei Bakar	Gawi Bersama	24 Juni 2019	Pengelolaan Gedung Olahraga, Penyewaan Sound system, Madu Kalulut, Penjualan Saprodi, Material	Aktif
	5	Galam	Mandiri Bersama	03 Juli 2019	Jasa Pembayaran listrik, Madu Kalulut, Pengadaan Material, Peternakan Unggas petelur, Pengelolaan air bersih, Pengelolan wisata	Tidak
	6	Pemalongan	Fajar Sejahtera	27 Agustus 2019	Pengelolaan Gedung olahraga, Toko ATK	Aktif
	7	Tanjung	Tanjung Raya Perkasa	27 Agustus 2019		
	8	Kunyt	Kunyt Berusaha Selalu	04 Agustus 2020		
	9	Bajuin	Kayuh Baimbai	28 September 2020		
<b>3</b>		<b>KEC. BATU AMPAR</b>				
	1	Damit	Bina Sejahtera	06 Juli 2015	Penggemukan sapi dan SP	Aktif
	2	Batu Ampar	Batu Ampar	Tahun 2011	Perguliran Dana	Aktif
	3	Durian Bungkok	Durian Bungkok	01 Juni 2016	Unit Pasar	Aktif

	4	Gunung Mas	Gunung Mas	10 Maret 2018	Penjualan Sembako	Aktif
	5	Pantai Linuh	Maju Jaya	29 Oktober 2018	Pengelolaan air bersih, Pengadaan Material	Tidak
	6	Tajau Mulya	Tajau Mulya Makmur	01 Juli 2018	Bidang Produksi dan perdagangan	Tidak
	7	Damar Lima	Tunas Abadi	14 Mei 2018	Penggemukan Sapi, Pengelolaan Air Bersih	Tidak
	8	Jilatan	Berkat Maju Bersama	xx xxxx 2018	Jasa PPOB	Aktif
	9	Gunung Melati	Mekar Sedayu	xx xxxx 2019		
	10	Jilatan Alur	Makmur Jaya	xx xxxx 2019		
	11	Bluru	Berkah Jaya Mandiri	xx xxxx 2019		
<b>4</b>		<b>KEC. JORONG</b>				
	1	Simpang 4 Sungai Baru	Karya Putra Pribumi	16 Mei 2017	Jasa Angkutan,Perkebunan, Pternakan	Tidak
	2	Asam Jaya	Bina Bakti Sejahtera	11 Juni 2014	pengelola pasar, pamsimas	Tidak
	3	Alur	Harapan Sejahtera	29 Oktober 2014	Air Bersih	Aktif
	4	Karang Rejo	Sejahtera	15 September 2016	penggemukan sapi dan jasa	Aktif
	5	Swarangan	Marlin Jaya Mandiri	November 2018	Jual Beli BBM, Pengelolaan Pasar, Pengadaan Tenaga Kerja	Aktif
	6	Asam-asam	Maju Jaya Bersama	01 Desember 2018	Jasa, Perikanan	Tidak
	7	Jorong	Berkah Ibu	24 April 2019	Tambak Ikan, Saprodin, Jual beli sawit, Kerjasama pihak ke 3, Pelelangan Ikan	
	8	Sabuhur	Berkat Bersama	8 Tahun 2018	Peternakan	Tidak
<b>5</b>		<b>KEC. KINTAP</b>				
	1	Pandan Sari	Mitra Rumpun Pandansari	12 Nopember 2015	Pasar Desa, Wisata Desa, Jasa	Aktif
	2	Kintap	Al-Mu'awanah	02 September 2015	Jasa angkutan, penggemukan ternak, simpan pinjam	Tidak
	3	Kintapura	Amanah	19 Oktober 2015	Foto copy dan ATK	Tidak
	4	Sungai Cuka	Srindat Jaya	20 Oktober 2015	Jasa, Pertanian, Peternakan, IRT	Tidak

	5	Riam Adungan	Riam Jaya	13 Oktober 2015	Jasa, perdagangan, perkebunan, industri	Tidak
	6	Muara Kintap	Muara Maju Bersama	22 Juni 2015	IRT, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, pasar desa, SP, Pengadaan barang Jasa	Tidak
	7	Salaman	Salaman Membangun	05 Mei 2015	Jasa Angkutan dan perkebunan	Tidak
	8	Kintap Kecil	Riam Jaya	25 September 2015	Tani, Kebun, Ternak, Jasa IRT	Tidak
	9	Pasir Putih	Barkat Manuntung	03 September 2015	Perkebunan, pertanian, material, SP, Peternakan, Jasa	Tidak
	10	Sumber Jaya	Usaha Bersama	28 September 2015	Perikanan, IRT, Jasa, Peternakan	Aktif
	11	Bukit Mulia	Berkah Mulia	30 September 2015	Pertanian, Perkebunan, perdagangan, Jasa, Pertambangan	Tidak
	12	Kebun Raya	Maju Bersama	30 September 2015	Perkebunan, IRT, Jasa	Tidak
	13	Mekar Sari	Maju Bersama	28 September 2015	Jasa, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, IRT, SPP	Tidak
	14	Sebamban Baru	Bumdes Maju Bersama	19 Oktober 2015	-	Tidak
<b>6</b>		<b>KEC. TAKISUNG</b>				
	1	Benua Tengah	Maju Bersama	01 Juli 2018	Saprotan, Pengelolaan Sampah	Tidak
	2	Sumber Makmur	Maju Jaya	14 Desember 2017	Perdagangan, Jasa	Tidak
	3	Pagatan Besar	Bina Maju Lestari	10 Agustus 2018	Ekowisata Hutan Mangrove	Aktif
	4	Kuala Tambangan	Batu Lima Tambangan	22 Oktober 2018	Jasa, Perdagangan	Tidak
	5	Ranggang	Karya Bersama	10 Nov 2018	Pengelolaan Portal, Pembuatan Harang	Tidak
	6	Batilai	Jaya Bersama	28 Nopember 2018	Persewaan Peralatan Pesta, Pengelolaan Wisata	Tidak
	7	Telaga Langsung	Berkat Sepakat	04 Desember 2018	Jasa, Perdagangan	Tidak
	8	Gunung Makmur	Maju Bersama	17 Desember 2018	Jasa, Perdagangan	Tidak
	9	Takisung	Karya Bhakti Bersama	05 Desember 2018	Pengelolaan Wisata Pantai	Tidak

	10	Benua Lawas	Bangun Banua	05 Desember 2019		
	11	Ranggang Dalam	Berkat Bakula	05 Desember 2019		
	12	Tabanio	Usaha Bersama	05 Desember 2019		
<b>7</b>		<b>KEC. PANYIPATAN</b>				
	1	Tanjung Dewa	Tanjung Bersama	01 Desember 2014	Industri RT, Simpan pinjam	Tidak
	2	Batakan	Bangun Banua	28 Nopember 2014	Konstruksi, Industri RT), SPP, Wisata, Pertanian, perkebunan, perikanan	Tidak
	3	Kandangan Baru	Munggu Jaya	02 April 2016	ATK, Saprotan	Tidak
	4	Sukaramah	Karya Mandiri	02 April 2019		
	5	Kuringkit	Rakat Mufakat	06 Juli 2020		
	6	Panyipatan	Panyipatan Jaya	13 Juli 2020		
	7	Kandangan Lama	Kandangan Lama Sejahtera	14 Juli 2020		
<b>8</b>		<b>KEC. TAMBANG ULANG</b>				
	1	Martadah Baru	Tri Tunggal Mandiri	30 Januari 2018	Jasa, Pasar Desa, Objek wisata, Bank Sampah, Perdagangan	Aktif
	2	Pulau Sari	Rakat Mufakat	27 Desember 2018	Jasa, Pasar Desa, Bank Sampah	Aktif
	3	Martadah	Tarini Jaya	11 Maret 2019	Bank Sampah, Pengelolaan Air Bersih, Pengelolaan Portal	Tidak
	4	Gunung Raja	Sinar Jaya	08 April 2019	Cafetaria, Kios Desa, Bank Sampah, Kerjasama Pihak ke 3	Tidak
	5	Bingkulu	Bingkulu Sejahtera	05 Juli 2019	Jual Saprodi, Jasa PPOB, Penggemukan sapi, ATK dan Foto copy	Tidak
	6	Sungai Jelai	Sungai Jelai Sejahtera	05 Agustus 2020		
	7	Sungai Pinang	Sungai Pinang Jaya Abadi	23 Oktober 2020		
<b>9</b>		<b>KEC. BATI-BATI</b>				
	1	Ujung	Ujung	01 Maret 2018	Usaha Batako	Tidak

	2	Banyu Irang	Maju Bersama	01 Maret 2018	Jasa, Perdagangan, Perkebunan	Aktif
	3	Banua Raya	Benua Raya Mufakat	18 Desember 2015	Pertanian, SP	Tidak
	4	Nusa Indah	Anugerah Jaya	18 Maret 2016	Jasa, Waserda, Saprotan, SP	Tidak
	5	Ujung Baru	Gawi Sabumi	09 Desember 2016	Pertanian, Jasa, SP, Sewa Tenda	Aktif
	6	Pandahan	Boga Jaya	11 Januari 2017	Pasar Desa, Desa Wisata	Aktif
	7	Bentok Darat	Bentok Darat sejahtera	28 Juli 2018	Jasa penyewaan Tenda, Pertanian	Aktif
	8	Sambangan	Gawi Manuntung	14 September 2018	Perdagangan, Jasa	Tidak
	9	Padang	Padang Berkah Makmur	23 September 2019	-	Tidak
	10	Bentok Kampung	Mandiri Sejahtera	23 September 2019		
	11	Liang Anggang	Berkah Karya Abadi	23 Juni 2020		
	12	Kait-Kait	Maju Bersama	21 September 2020		
<b>10</b>		<b>KEC. KURAU</b>				
	1	Bawah Layung	Amanah	23 September 2019		
	2	Tambak Karya	Karya Bersama	18 Agustus 2020		
	3	Tambak Sarinah	Jaya Sejahtera	23 September 2020		
	4	Sarikandi	Sarikandi Maju	27 Agustus 2020		
<b>11</b>		<b>KEC. BUMI MAKMUR</b>				
	1	Bumi Harapan	Jaya Sejahtera	23 Maret 2017	Jasa, perdagangan	Tidak
	2	Sungai Rasau	Anugerah	19 Juli 2017	Waserda, Pertanian, Perikanan	Aktif
	3	Handil Gayam	Berkat Usaha	16 Maret 2018	Jasa, Saprotan	Aktif
	4	Handil Birayang Atas	Ruhui Rahayu	01 April 2018	Jasa dan Sarana Produksi	Aktif
	5	Handil Birayang Bawah	Sumber Makmur	24 Mei 2018	Jasa dan Saprodu	Tidak
<b>TOTAL BUMDesa = 100</b>						

### Foto Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Pembentukan BUMdes



2) Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan TTG

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja  
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga kemasyarakatan lainnya	Jumlah melaksanakan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga lainnya	LKD 130 Desa , KPMD dan KPSPAM	KPMD dan KPSPAM 1 kali	100% LKD tidak terlaksana karena covid 19
2	Melaksanakan pendokumentasi kegiatan SDA dan TTG	Jumlah pendokumentasian kegiatan SDA dan TTG	65 alat teknologi tepat guna	24 alat teknologi tepat guna	37%
3	Melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek	Jumlah melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek	10 kali	10 kali	100%
4	Melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan kelembagaan PosyantekDes	Jumlah melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan Kelembagaan	1 kali	1 kali	100%
5	Melaksanakan rembuk posyantek	Jumlah melaksanakan rembuk posyantek	1 kali	1 kali	100%
6	Melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG	Jumlah melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG	1 kali	1 kali	100%
7	Melaksanakan keikutsertaan gelar TTG	Jumlah melaksanakan keikutsertaan gelar TTG TNasional		-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pergeseran



	Tingkat Nasional				anggaran
	Rata-rata capaian				85%

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah melaksanakan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga lainnya		Tidak ada kegiatan	KPMD dan KPSP AM 1 kali	LKD 130 Desa , KPMD dan KPSPAM	KPMD dan KPSPAM 1 kali	100% LKD tidak terlaksana karena covid 19
2	Jumlah pendokumentasian kegiatan SDA dan TTG	-	62 alat TTG	24 alat TTG	65 alat TTG	24 alat TTG (jumlah alat TTG dibatasi karena covid 19)	37%
3	Jumlah melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek			10 kali	10 kali	10 kali	100%
4	Jumlah melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan Kelembagaan	0	Tidak dilaksanakan karena covid 19	1 kali	1 kali	1 kali	100%
5	Jumlah melaksanakan rembuk posyantek		Tidak ada kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	100%
6	Jumlah melaksanakan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%

	gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG						
7	Jumlah melaksanakan keikutsertaan gelar TTG Tk. Nasional	1 TTG	0	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pergeseran anggaran
	Rata-rata Capaian						100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata kinerja Seksi Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan TTG terealisasi 100%, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena situasi covid 19 yang masih ada, hal ini berakibat pada capaian realisasi anggaran (keuangan) sedangkan untuk realisasi fisik juga berakibat pada pengurangan volume alat TTG mengingat pada saat kegiatan dilaksanakan tidak boleh mengumpulkan orang banyak dan sesuai anjuran dari tim satgas covid 19.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (85%) dan tahun 2020 (100%), hal ini disebabkan karena ada beberapa indikator yang kegiatannya melibatkan orang banyak sehingga tidak dilaksanakan sesuai target volumenya.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah melaksanakan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga lainnya.

Tahun 2021 indikator kinerja jumlah terlaksananya koordinasi KPMD dan jumlah terlaksananya koordinasi KPSPAM (dalam kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi) dalam mendukung kegiatan posyantek terlaksana sesuai target 100%.

- Jumlah pendokumentasian kegiatan SDA dan TTG.

Tahun 2021 indikator kinerja jumlah pendokumentasian kegiatan SDA dan TTG ini hanya dapat dilaksanakan 24 alat TTG tidak sesuai dengan yang ditargetkan 65 alat TTG atau 37%, hal ini disebabkan karena pada saat pelaksanaan ada mengalami beberapa kali penundaan yang disebabkan melonjaknya angka covid 19.

- Jumlah melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek.

Tahun 2021 indikator kinerja jumlah melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek ini tercapai sesuai target 100%.

- Jumlah melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan Kelembagaan.

Tahun 2021 indikator kinerja jumlah melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan Kelembagaan ini tercapai sesuai target 100%..

- Jumlah melaksanakan rembuk posyantek.

Tahun 2021 indikator kinerja jumlah melaksanakan rembuk posyantek terealisasi sesuai target 100%.

- Jumlah melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG.

Tahun 2021 indikator kinerja jumlah melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG ini terealisasi sesuai target 100% walaupun dengan mengurangi jumlah volume orangnya.

- Jumlah melaksanakan keikutsertaan gelar TTG Tk. Nasional.

Tahun 2021 kegiatan ini ditiadakan karena adanya covid 19.

d) Analis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang kinerja Seksi Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan TTG

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga kemasyarakatan lainnya	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	25.367.200,-
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	312.488.806,-

			Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
2	Melaksanakan pendokumentasi kegiatan SDA dan TTG	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	312.488.806,-	
3	Melaksanakan kegiatan sosialisasi Posyantek					
4	Melaksanakan pelatihan TTG serta penguatan kelembagaan PosyantekDes					
5	Jumlah melaksanakan rembuk posyantek					
6	Jumlah melaksanakan gelar dan lomba kreasi dan inovasi TTG					
7	Jumlah melaksanakan keikutsertaan gelar TTG Tk. Nasional					

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan

## Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dengan indikator keluaran jumlah terlaksananya kegiatan sosialisasi posyantek (target 10 desa), jumlah terlaksananya koordinasi KPMD Tk. Kabupaten (target 2 kali kegiatan), jumlah terlaksananya koordinasi KPSPAM Tk. Kabupaten (target 1 kali kegiatan), jumlah terlaksananya lomba kreasi dan inovasi TTG Tk. Kabupaten (target 1 kali kegiatan), jumlah terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan posyantek desa (target 11 desa) dan jumlah terlaksananya rembuk posyantek Tk. Kabupaten terealisasi 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 312.488.806,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 258.632.551,- atau 82,77%

Foto Seksi Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan TTG









### 3) Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja  
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melakukan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	Jumlah melaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	26 desa	25 Desa	96%
2	Melaksanakan Pembinaan TMMD	Jumlah melaksanakan pembinaan TMMD	1 desa	1 desa	100%
3	Melaksanakan rakor posyandu	Jumlah melaksanakan rakor Posyandu	1 kali	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya covid 19

4	Melaksanakan pendataan System Informasi Posyandu	Jumlah melaksanakan pendataan system informasi posyandu	130 desa	130 desa	100%
5	Memantau pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah memantau pelaksanaan Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	147 PKK aktif	147 PKK aktif	100%
6	Memantau pelaksanaan musyawarah desa	Jumlah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	50 desa	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya covid 19
7	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	1 kali	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya covid 19
Rata-rata capaian					57,14%

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah melaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	26 Desa	9 Desa	25 Desa	26 desa	25 Desa	96%
2	Jumlah melaksanakan pembinaan TMMD	-	-	1 desa	1 desa	1 desa	100%
3	Jumlah melaksanakan rakor Posyandu	-	-	-	1 kali	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena covid 19
4	Jumlah melaksanakan pendataan system informasi posyandu	-	-	130 desa	130 desa	130 desa	100%
5	Jumlah memantau pelaksanaan Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan Gerakan pemberdayaan	147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	147 PKK aktif	100%



	masyarakat dan kesejahteraan keluarga						
6	Jumlah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	3 desa	-	-	50 Desa	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena covid 19
7	Jumlah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	-	-	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena covid 19
	Rata-rata Capaian						57,14%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata capaian kinerja Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat ada yang terealisasi 100%, ada yang 96% bahkan 0%, hal ini disebabkan ada beberapa indikator yang kegiatannya belum dilaksanakan pada tahun ini dikarenakan pandemic covid 19 yang masih tinggi sehingga apabila kita mau melaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak/masyarakat harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari tim satgas covid 19.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (57,14%) dan tahun 2020 (100%), hal ini disebabkan ada beberapa indikator yang kegiatannya belum dilaksanakan pada tahun ini dikarenakan pandemic covid 19 yang masih tinggi sehingga apabila kita mau melaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak/masyarakat harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari tim satgas covid 19.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah melaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang

Pada tahun 2021 jumlah desa yang mendapatkan Program Manunggal Tuntung Pandang se Kabupaten Tanah Laut dari yang ditargetkan 26 desa hanya terealisasi 25 desa atau 96% hal ini disebabkan karena pada saat akan melaksanakan kegiatan terjadi pandemic covid 19 yang masih tinggi, bahkan wilayah Kabupaten Tanah Laut

terjadi lonjakan covid 19 dan mendapatkan status level III sehingga diputuskan untuk menunda 1 desa yang tertinggal.

- Jumlah Pelaksanaan Musrenbangdes yang sesuai dengan aturan. Pada tahun 2020 kegiatan ini tidak dilaksanakan.
- Jumlah KPMD yang terlatih dan sosialisasi pembentukan KPMD di Kecamatan. Tahun 2020 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya refocusing sehingga kegiatan ini di hapuskan.
- Jumlah LPMD yang dibina.

Tahun 2020 kegiatan ini belum dilaksanakan karena kegiatan ini baru akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

- Jumlah PKK kabupaten, kecamatan dan desa yang dibina.

Terealisasi sebanyak 147 PKK (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) aktif yang dibina dari target 147 PKK aktif, yang berarti telah terealisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada kendala yang dihadapi.

- Jumlah desa yang dibina untuk melaksanakan gotong royong.

Tahun 2020 dari yang ditargetkan sebanyak 11 Desa tidak terealisasi dikarenakan adanya refocusing sehingga kegiatan ini di hapus.

d) Analis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang kinerja Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1.310.417.880,-
2	Melaksanakan Pembinaan TMMD				
3	Melaksanakan rakor posyandu				
4	Melaksanakan pendataan System Informasi Posyandu				

			Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
5	Memantau pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga		Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	740.135.212,-
6	Memantau pelaksanaan musyawarah desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	25.367.200,-
7	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	23.388.260,-

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.  
 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat  
 Pelaksanaan Manunggal Tuntung Pandang di tahun 2021 dengan target indikator keluaran 26 desa terealisasi 25 desa atau 96%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 1.310.417.880,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 962.837.900,- atau 73,48%  
 Pelaksanaan TMMD dan pelaksanaan terdatanya system SIP di 130 desa terealisasi 100%  
 Sedangkan kegiatan rakor posyandu tidak bisa dilaksanakan karena ketika pelaksanaan rakor pada bulan September 2021 wabah pandemic covid 19 semakin tinggi dan Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam level III.
  - b. Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  
 Pelaksanaan kegiatan fasilitas Tim Penggerak PKK melakukan pembinaan terhadap 147 PKK aktif dengan target 100% dan terealisasi sesuai target 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 740.135.212,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 527.859.294,- atau 71,32%
  - c. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa  
 Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena berbenturan dengan program dari pihak Kepolisian dengan program kampung tangguh, sehingga akan menimbulkan keluaran yang sama dalam penanganan masalah covid 19 serta padatnya kegiatan yang ada pada Sub Bidang Bina Partisipasi Masyarakat.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa  
 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  
 Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa  
 Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan keluaran indikator jumlah terbinaanya penyelenggaraan musyawarah desa tidak terealisasi 100% karena isi dari kegiatan tersebut berupa makan minum rapat serta perjalanan dinas

dalam daerah, yang sifatnya kegiatan tersebut menunggu dari pihak kecamatan/desa mengundang pihak PMD dalam rangka fasilitasi musrenbangdesa, namun karena masih dalam situasi pandemic maka pihak kecamatan/desa membatasi jumlah orang dalam kegiatan dimaksud.

#### DATA PKK AKTIF SE-KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN	NAMA PKK	KETERANGAN
1	Kabupaten Tanah Laut	TP. PKK Kabupaten Tanah Laut	AKTIF
2	Kecamatan Takisung	TP. PKK Kecamatan Takisung	AKTIF
3	Benua Lawas	TP. PKK Desa Benua Lawas	AKTIF
4	Tabonio	TP. PKK Desa Tabonio	AKTIF
5	Kuala Tambangan	TP. PKK Desa Kuala Tambangan	AKTIF
6	Takisung	TP. PKK Desa Takisung	AKTIF
7	Gunung Makmur	TP. PKK Desa Gunung Makmur	AKTIF
8	Benua Tengah	TP. PKK Desa Benua Tengah	AKTIF
9	Ranggang	TP. PKK Desa Ranggang	AKTIF
10	Pagatan Besar	TP. PKK Desa Pagatan Besar	AKTIF
11	Batilai	TP. PKK Desa Batilai	AKTIF
12	Ranggang Dalam	TP. PKK Desa Ranggang Dalam	AKTIF
13	Telaga Langsung	TP. PKK Desa Telaga Langsung	AKTIF
14	Sumber Makmur	TP. PKK Desa Sumber Makmur	AKTIF
15	Kecamatan Jorong	TP. PKK Kecamatan Jorong	AKTIF
16	Sabuhur	TP. PKK Desa Sabuhur	AKTIF
17	Jorong	TP. PKK Desa Jorong	AKTIF
18	Asam-Asam	TP. PKK Desa Asam-Asam	AKTIF
19	Batalang	TP. PKK Desa Batalang	AKTIF
20	Swarangan	TP. PKK Desa Swarangan	AKTIF
21	Muara Asam-Asam	TP. PKK Desa Muara Asam-Asam	AKTIF
22	Alur	TP. PKK Desa Alur	AKTIF

23	Asri Mulia	TP. PKK Desa Asri Mulia	AKTIF
24	Karang Rejo	TP. PKK Desa Karang Rejo	AKTIF
25	Asam Jaya	TP. PKK Desa Asam Jaya	AKTIF
26	Simpang Empat Sei Baru	TP. PKK Desa Simpang Empat Sei Baru	AKTIF
27	Kecamatan Pelaihari	TP. PKK Kecamatan Pelaihari	AKTIF
28	Kelurahan Angsau	TP. PKK Kelurahan Angsau	AKTIF
29	Kelurahan Saranag Halang	TP. PKK Kelurahan Saranag Halang	AKTIF
30	Kelurahan Pelaihari	TP. PKK Kelurahan Pelaihari	AKTIF
31	Kelurahan Pabahanan	TP. PKK Kelurahan Pabahanan	AKTIF
32	Kelurahan Karang Taruna	TP. PKK Kelurahan Karang Taruna	AKTIF
33	Bumi Jaya	TP. PKK Desa Bumi Jaya	AKTIF
34	Sei Riam	TP. PKK Desa Sei Riam	AKTIF
35	Tampang	TP. PKK Desa Tampang	AKTIF
36	Telaga	TP. PKK Desa Telaga	AKTIF
37	Panjaratan	TP. PKK Desa Panjaratan	AKTIF
38	Atu-atu	TP. PKK Desa Atu-atu	AKTIF
39	Panggung	TP. PKK Desa Panggung	AKTIF
40	Tungkaran	TP. PKK Desa Tungkaran	AKTIF
41	Ujung Batu	TP. PKK Desa Ujung Batu	AKTIF
42	Panggung Baru	TP. PKK Desa Panggung Baru	AKTIF
43	Ambungan	TP. PKK Desa Ambungan	AKTIF
44	Guntung Besar	TP. PKK Desa Guntung Besar	AKTIF
45	Kampung Baru	TP. PKK Desa Kampung Baru	AKTIF
46	Sumber Mulia	TP. PKK Desa Sumber Mulia	AKTIF
47	Pemuda	TP. PKK Desa Pemuda	AKTIF
48	Kecamatan Kurau	TP. PKK Kecamatan Kurau	AKTIF
49	Sungai Bakau	TP. PKK Sungai Bakau	AKTIF
50	Maluka Baulin	TP. PKK Maluka Baulin	AKTIF

51	Bawah Layung	TP. PKK Bawah Layung	AKTIF
52	Tambak Sarinah	TP. PKK Tambak Sarinah	AKTIF
53	Kali Besar	TP. PKK Desa Kali Besar	AKTIF
54	Handil Negara	TP. PKK Desa Handil Negara	AKTIF
55	Padang Luas	TP. PKK Desa Padang Luas	AKTIF
56	Kurau	TP. PKK Desa Kurau	AKTIF
57	Tambak Karya	TP. PKK Desa Tambak Karya	AKTIF
58	Raden	TP. PKK Desa Raden	AKTIF
59	Sarikandi	TP. PKK Desa Sarikandi	AKTIF
60	Kecamatan Bati-Bati	TP. PKK Kecamatan Bati-Bati	AKTIF
61	Benua Raya	TP. PKK Desa Benua Raya	AKTIF
62	Bati-Bati	TP. PKK Desa Bati-Bati	AKTIF
63	Ujung	TP. PKK Desa Ujung	AKTIF
64	Liang Anggang	TP. PKK Desa Liang Anggang	AKTIF
65	Bentok Kampung	TP. PKK Desa Bentok Kampung	AKTIF
66	Bentok Darat	TP. PKK Desa Bentok Darat	AKTIF
67	Banyu Irang	TP. PKK Desa Banyu Irang	AKTIF
68	Nusa Indah	TP. PKK Desa Nusa Indah	AKTIF
69	Pandahan	TP. PKK Desa Pandahan	AKTIF
70	Padang	TP. PKK Desa Padang	AKTIF
71	Ujung Baru	TP. PKK Desa Ujung Baru	AKTIF
72	Sambangan	TP. PKK Desa Sambangan	AKTIF
73	Kait-Kait	TP. PKK Desa Kait-Kait	AKTIF
74	Kait-kait Baru	TP. PKK Desa Kait-kait Baru	AKTIF
75	Kecamatan Panyipatan	TP. PKK Kecamatan Panyipatan	AKTIF
76	Batu Tungku	TP. PKK Desa Batu Tungku	AKTIF
77	Panyipatan	TP. PKK Desa Panyipatan	AKTIF
78	Kandangan Baru	TP. PKK Desa Kandangan Baru	AKTIF
79	Kandangan Lama	TP. PKK Desa Kandangan Lama	AKTIF

80	Batakan	TP. PKK Desa Batakan	AKTIF
81	Kuringkit	TP. PKK Desa Kuringkit	AKTIF
82	Tanjung Dewa	TP. PKK Desa Tanjung Dewa	AKTIF
83	Suka Ramah	TP. PKK Desa Suka Ramah	AKTIF
84	Batu Mulya	TP. PKK Desa Batu Mulya	AKTIF
85	Bumi Asih	TP. PKK Desa Bumi Asih	AKTIF
86	Kecamatan Kintap	TP. PKK Kecamatan Kintap	AKTIF
87	Pandan Sari	TP. PKK Desa Pandan Sari	AKTIF
88	Kintap	TP. PKK Desa Kintap	AKTIF
89	Kintapura	TP. PKK Desa Kintapura	AKTIF
90	Sei Cuka	TP. PKK Desa Sei Cuka	AKTIF
91	Riam Adungan	TP. PKK Desa Riam Adungan	AKTIF
92	Muara Kintap	TP. PKK Desa Muara Kintap	AKTIF
93	Salaman	TP. PKK Desa Salaman	AKTIF
94	Kintap Kecil	TP. PKK Desa Kintap Kecil	AKTIF
95	Pasir Putih	TP. PKK Desa Pasir Putih	AKTIF
96	Sumber Jaya	TP. PKK Desa Sumber Jaya	AKTIF
97	Bukit Mulia	TP. PKK Desa Bukit Mulia	AKTIF
98	Kebun Raya	TP. PKK Desa Kebun Raya	AKTIF
99	Mekar Sari	TP. PKK Desa Mekar Sari	AKTIF
100	Sebamban Baru	TP. PKK Desa Sebamban Baru	AKTIF
101	Kecamatan Tambang Ulang	TP. PKK Desa Kecamatan Tambang Ulang	AKTIF
102	Bingkulu	TP. PKK Desa Bingkulu	AKTIF
103	Gunung Raja	TP. PKK Desa Gunung Raja	AKTIF
104	Kayu Abang	TP. PKK Desa Kayu Abang	AKTIF
105	Martadah	TP. PKK Desa Martadah	AKTIF
106	Martadah Baru	TP. PKK Desa Martadah Baru	AKTIF
107	Pulau Sari	TP. PKK Desa Pulau Sari	AKTIF



108	Sungai Jelai	TP. PKK Desa Sungai Jelai	AKTIF
109	Sungai Pinang	TP. PKK Desa Sungai Pinang	AKTIF
110	Tambang Ulang	TP. PKK Desa Tambang Ulang	AKTIF
111	Kecamatan Batu Ampar	TP. PKK Kecamatan Batu Ampar	AKTIF
112	Batu Ampar	TP. PKK Desa Batu Ampar	AKTIF
113	Gunung Mas	TP. PKK Desa Gunung Mas	AKTIF
114	Tajau Mulia	TP. PKK Desa Tajau Mulia	AKTIF
115	Jilatan	TP. PKK Desa Jilatan	AKTIF
116	Durian Bungkok	TP. PKK Desa Durian Bungkok	AKTIF
117	Ambawang	TP. PKK Desa Ambawang	AKTIF
118	Damit	TP. PKK Desa Damit	AKTIF
119	Gunung Melati	TP. PKK Desa Gunung Melati	AKTIF
120	Bluru	TP. PKK Desa Bluru	AKTIF
121	Pantai Linuh	TP. PKK Desa Pantai Linuh	AKTIF
122	Damit Hulu	TP. PKK Desa Damit Hulu	AKTIF
123	Jilatan Alur	TP. PKK Desa Jilatan Alur	AKTIF
124	Damar Lima	TP. PKK Desa Damar Lima	AKTIF
125	Tajau Pecah	TP. PKK Desa Tajau Pecah	AKTIF
126	Kecamatan Bajuin	TP. PKK Kecamatan Bajuin	AKTIF
127	Tirta Jaya	TP. PKK Desa Tirta Jaya	AKTIF
128	Galam	TP. PKK Desa Galam	AKTIF
129	Pemalongan	TP. PKK Desa Pemalongan	AKTIF
130	Sungai Bakar	TP. PKK Desa Sungai Bakar	AKTIF
131	Tanjung	TP. PKK Desa Tanjung	AKTIF
132	Bajuin	TP. PKK Desa Bajuin	AKTIF
133	Ketapang	TP. PKK Desa Ketapang	AKTIF
134	Kunyt	TP. PKK Desa Kunyt	AKTIF
135	Tebing Siring	TP. PKK Desa Tebing Siring	AKTIF
136	Kecamatan Bumi Makmur	TP. PKK Kecamatan Bumi Makmur	AKTIF

137	Bumi Harapan	TP. PKK Desa Bumi Harapan	AKTIF
138	Kurau Utara	TP. PKK Desa Kurau Utara	AKTIF
139	Sungai Rasau	TP. PKK Desa Sungai Rasau	AKTIF
140	Pantai Harapan	TP. PKK Desa Pantai Harapan	AKTIF
141	Handil Birayang Atas	TP. PKK Desa Handil Birayang Atas	AKTIF
142	Handil Labuan Amas	TP. PKK Desa Handil Labuan Amas	AKTIF
143	Handil Suruk	TP. PKK Desa Handil Suruk	AKTIF
144	Handil Birayang Bawah	TP. PKK Desa Handil Birayang Bawah	AKTIF
145	Handil Babirik	TP. PKK Desa Handil Babirik	AKTIF
146	Handil Gayam	TP. PKK Desa Handil Gayam	AKTIF
147	Handil Maluka	TP. PKK Desa Handil Maluka	AKTIF
TOTAL PKK = 147			

Foto Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat (PKK)





Foto Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat (MTP)



d. Sasaran Eselon III (Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan)

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya administrasi desa	Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata Capaian							100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata Capaian Kinerja Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan telah terealisasi 100%. Dari 1 indikator kinerja, indikator Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik telah tercapai 100% dari target 100%.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2020 dengan tahun 2021 yang terdiri dari indikator Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik tercapai 100% pada tahun 2021 dan juga tahun 2020 sebelumnya.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik

Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 ditargetkan mencapai angka 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik berada pada 3 Seksi yaitu Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Pencapaian atas target indikator ini tercapai atas kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya administrasi desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		7.273.114.554,-
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	130.827.366,-
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	45.624.810,-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.715.807.144,-
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	445.216.086,-
				Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	25.367.200,-
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	234.095.116,-

				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.546.023.120,-
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	803.019.286,-
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.720.400,-
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	205.076.916,-
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	97.337.110,-
		Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa		436.188.310,-
				Fasilitasi Tata Wilayah Desa	400.624.520,-
				Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	35.563.790,-

1) Kepala Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja  
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melakukan pembinaan penataan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terbina	520 orang	130 orang	40%
2	Melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa	- Jumlah desa yang ditetapkan dan ditegaskan batas desa - Jumlah desa yang ditata kelembagaan desanya	- 4 desa - 130 desa	- 0 desa - 130 desa	100%
3	Melakukan fasilitasi pilkades	Jumlah terpilih dan dilantiknya kepala desa	26 kepala desa	26 kepala desa	100%
	Rata-rata capaian				60%

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terbina	1322 orang	650 orang	130 orang	520 orang	130 orang	40%
2	- Jumlah desa yang ditetapkan dan ditegaskan batas desa -Jumlah desa yang ditata kelembagaan desanya	0 0	-11 desa	- 0 desa - 130 desa	- 4 desa - 130 desa	- 0 desa - 130 desa	100%

3	Jumlah terpilih dan dilantiknya kepala desa	52 kepala desa	52 kepala desa	26 kepala desa	26 kepala desa	26 kepala desa	100%
	Rata-rata Capaian						60%

a) Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata – rata capaian kinerja Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan tahun 2021 terealisasi 100% namun ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai target 100% nya.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (60%) dan tahun 2020 (100%). Hal ini sudah mencapai target untuk semua kegiatan yang dilaksanakan.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terbina.

Terealisasi sebanyak 130 orang aparatur pemerintahan desa yang dibina dari target 650 orang, yang berarti terealisasi 40%. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan yang paling besar adalah pandemic covid 19, sehingga PPTK terpaksa mengurangi jumlah/volume orang yang mengikuti kegiatan pelatihan/bimtek.

- Jumlah desa yang ditetapkan dan ditegaskan batas desa.

Tahun 2021 kegiatan ini ditargetkan 4 desa yang ditetapkan dan ditegaskan batas desanya tidak dapat dilaksanakan penetapan batas desanya karena mengingat situasi pada saat kegiatan dilaksanakan terjadi lonjakan pandemic covid 19 dan pada saat yang bersamaan PPTK juga mempunyai sub kegiatan yang banyak menguras waktu dan tenaga pada sub kegiatan pemilihan dan pelantikan kepala desa tahun 2021, namun PPTK tetap mensosialisasikan kegiatan desa yang ditetapkan dan ditegaskan batas desa.

- Jumlah desa yang ditata kelembagaan desanya

Pelaksanaan kegiatan Jumlah desa yang ditata kelembagaan desanya terealisasi 100% dengan bentuk kegiatan pembuatan SOTK desa.

- Jumlah terpilih dan dilantiknya kepala desa.

Terealisasi sebanyak 26 orang Kepala Desa yang dilantik dari target 26 orang Kepala



Desa, yang berarti terealisasi 100%. Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang dihadapi.

d) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang kinerja Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan tahun 2021 adalah :

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan pembinaan penataan desa	Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	400.624.520,-
				Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	35.563.790,-
2	Melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	130.827.366,-
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	45.624.810,-
3	Melakukan fasilitasi pilkades	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.546.023.120,-

#### A. Program Penataan Desa

##### Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

##### a. Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa

Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa pada pelaksanaan tahun 2021 tidak terealisasi 100% sesuai target yang ditetapkan, indikator keluaran jumlah legalisasi batas wilayah administrasi pemerintahan desa dengan target 4 desa. Pagu anggaran sub kegiatan Rp. 400.624.520,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.688.500,- atau 4,66%

##### b. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa

Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa pada pelaksanaan tahun 2021 tidak terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan, indikator keluaran jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina. Pagu anggaran sub kegiatan Rp. 35.563.790,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0% (Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pandemic covid 19)

#### B. Program Administrasi Pemerintahan Desa

##### Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

##### a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan pada tahun 2021 tidak dapat memenuhi target 100% yang telah ditetapkan. Pagu anggaran sub kegiatan Rp. 130.827.366,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.735.247,- atau 60,95%

##### b. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa

Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa yang dilaksanakan pada tahun 2021 juga tidak memenuhi target 100% yang telah ditetapkan. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 45.624.810,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.410.500,- atau 3,09%

##### c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terealisasi 100% sesuai target yang ditetapkan. Pagu anggaran sebesar Rp. 2.546.023.120,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.185.043.906,- atau 85,82%

Foto Kegiatan Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan







2) Kepala Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang telah dibina	260 orang	260 orang	100%
2	Melaksanakan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang telah dibina	390 orang	390 orang	100%
3	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	11 desa 1 kelurahan	11 desa 1 kelurahan	100%
Rata-rata capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang telah dibina	11 Desa 1 Kelurahan	-	11 Desa 1 Kelurahan	260 orang	260 orang	100%
2	Jumlah anggota BPD yang telah dibina	100%	520 orang	520 orang	390 orang	390 orang	100%
3	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	11 desa 1 kelurahan	-	11 desa 1 kelurahan	11 desa 1 kelurahan	11 desa 1 kelurahan	100%
Rata-rata Capaian							100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata capaian kinerja Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan tahun 2021 terealisasi 100%. Semua kegiatan terlaksana semua sesuai target 100% yang ditetapkan.

b) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (100%) dan tahun 2020 (25%). Pada tahun 2021 semua kegiatan dapat terealisasi 100% dan kegiatan berjalan sesuai target capaian.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah aparatur pemerintahan desa yang telah dibina.  
Kegiatan jumlah aparatur pemerintahan desa yang telah dibina dilaksanakan sesuai target 100% sehingga terpenuhi.
- Jumlah anggota BPD yang telah dibina.  
Kegiatan jumlah anggota BPD yang telah dibina Terealisasi sebanyak 390 orang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya.  
Kegiatan jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya dengan target 11 desa dan 1 kelurahan terealisasi sesuai target 100%..

d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	445.216.086,-

2	Melaksanakan peningkatan kapasitas anggota BPD	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	205.076.916,-
3	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	97.337.110,-

#### A. Program Administrasi Pemerintahan Desa

##### Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

##### a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Dengan indikator keluaran jumlah aparatur pemerintahan desa yang diberikan pelatihan / bimbingan teknis dengan target 260 orang terealisasi 260 orang atau 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 445.216.086,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 168.907.727,- atau 37,94% (realisasi keuangan rendah disebabkan beberapa belanja yang dikurangi seperti penginapan yang semula 2 malam di kurangi jadi 1 malam saja sehingga akan berkurang juga dengan belanja makan minum kegiatan dan juga mengingat pandemic covid 19 yang masih tinggi)

##### b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Dengan indikator keluaran terpilih dan dilantiknya kepala desa dengan target 26 kepala desa terealisasi sesuai target 26 kepala desa atau 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 2.546.023.120 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.185.043.906 atau 85,82%

##### c. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Dengan indikator keluaran jumlah desa berciri khas yang terbentuk dengan target 5 desa dan terealisasi 6 desa melebihi target yang telah ditetapkan, jumlah desa yang dievaluasi dengan target 11 desa terealisasi 11 desa atau 100% , jumlah kelurahan yang dievaluasi dengan target 1 kelurahan terealisasi 1 kelurahan atau 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 97.337.110,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.714.500,- atau 16,14% (realisasi keuangan rendah disebabkan



beberapa anggaran belanja kegiatan yang tidak diamprahkan bahkan cenderung dikurangi, kondisi tersebut mengingat pandemic covid 19 yang masih tinggi)

Foto Kegiatan Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan







3) Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja

Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan keuangan desa	1560 orang	934 orang	64,23%
2	Melakukan pembinaan pengelolaan aset desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan aset desa		141 orang	100%
	Rata-rata capaian				68,91%

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan keuangan desa	1322 orang	1560 orang	934 orang	1560 orang	934 orang	64,23%
2	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan	44 orang	1560 orang	141 orang		141 orang	100%

	aset desa						
	Rata-rata Capaian						68,91%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata capaian kinerja Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa tahun 2021 terealisasi 68,91%. Hal ini disebabkan karena pada saat kegiatan akan dilaksanakan terjadi lonjakan covid 19 sehingga kegiatan terpaksa mengurangi jumlah / volume aparatur yang dibina / dibimtek.

b) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (68,91%) dan tahun 2020 (43,44%). Hal ini memang belum mencapai target awal tahun 2021 dikarenakan adanya lonjakan / pandemic covid 19.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan keuangan desa.

Terealisasi sebanyak 934 orang aparat pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan keuangan desa dengan target total 1560 orang, yang berarti terealisasi 64,23%. Hal ini disebabkan karena pada saat kegiatan akan dilaksanakan terjadi lonjakan pandemic covid 19.

- Jumlah aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan aset desa.

Terealisasi sebanyak 141 aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan yang dibina pengelolaan aset desa tentang APBDesa untuk meningkatkan kapasitasnya dari total target 1560 orang. Ini terealisasi 100%.

d) Analis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.715.807.144,-
2	Melakukan pembinaan pengelolaan aset desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.720.400,-

A. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan indikator keluaran jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina, tim evaluasi raperdes tentang APBDesa kecamatan terealisasi 934 orang dari total target 1560 orang atau realisasi fisik 64,23%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 2.715.807.144,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.019.605.358 atau 74,36%.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Dengan indikator keluaran jumlah aparatur kecamatan dan pemerintahan desa yang dibina terealisasi 141 orang dari total target 1560 orang atau realisasi fisik 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 24.720.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.548.900,- atau 58,85%.



Foto Kegiatan Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa







e. Sasaran Eselon III (Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan)

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Bidang Bina Pengembangan

Kawasan Perdesaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	100%	100%	100%	40%	100%	250%
2	Meningkatnya kualitas data desa	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa	100%	100%	100%	40%	100%	250%
3	Meningkatnya kemampuan pengurus Lembaga Adat Desa	Persentase lembaga adat desa yang dibina	100%	100%	100%	40%	100%	250%
4	Cakupan kinerja evaluasi tingkat perkembangan desa	Persentase desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya						
		Rata-rata Capaian						250%

desa yang dibina juga telah tercapai 100% dari target 40%. Untuk indikator Persentase desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya target tidak ada dan pada saat pelaksanaan tahun 2021 dipindahkan dan disesuaikan dengan tupoksi pada Kasi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes & Kel sehingga secara tidak langsung kegiatan dilaksanakan oleh Kasi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes & Kel.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2020 dengan tahun 2021 yang terdiri dari indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan tercapai 100% pada tahun 2021 dan juga tahun 2020 sebelumnya. Indikator Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa tercapai 100% pada tahun 2021 dan juga tahun 2020 sebelumnya. Dan yang terakhir indikator Persentase lembaga adat desa yang aktif juga tercapai 100% pada tahun 2021 dan juga tahun 2020 sebelumnya.

c) Analis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan.

Indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 ditargetkan mencapai angka 40%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase pengembangan kawasan perdesaan berada pada Seksi Bina Pengembangan Kawasan.

- Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa.

Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 ditargetkan mencapai angka 40%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa berada pada Seksi Bina Data dan Profil Desa.

- Persentase lembaga adat desa yang aktif.

Persentase lembaga adat desa yang aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 ditargetkan mencapai angka 40%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase lembaga adat desa yang aktif berada pada Seksi Bina Adat dan Budaya Desa.

Pencapaian atas semua target indikator tersebut tercapai atas kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan.



d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	126.463.386,-
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	150.513.330,-
2	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	803.019.286,-

3	Persentase lembaga adat desa yang dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	94.272.406,-
4	Persentase desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya				Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemdes & Kel

1) Kepala Seksi Bina Pengembangan Kawasan

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja  
Kepala Seksi Bina Pengembangan Kawasan tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melaksanakan fasilitasi untuk pembentukan BUMDesa bersama	Jumlah BUMDesa yang mengikuti sosialisasi pembentukan BUMDesa bersama	2 kecamatan sosialisasi, 2 desa eks transmigrasi	2 kecamatan sosialisasi, 2 desa eks transmigrasi	100%

2	Melakukan inventarisasi kepemilikan lahan eks. Pemukiman Transmigrasi (UPT)	Jumlah dokumen inventarisasi lahan eks. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)			100%
	Rata-rata capaian				100%

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah BUMDesa yang mengikuti sosialisasi pembentukan BUMDesa bersama	100%	1 kecamatan sosialisasi, 2 desa Eks. transmigrasi	2 kecamatan sosialisasi, 2 desa eks transmigrasi	2 kecamatan sosialisasi, 2 desa eks transmigrasi	2 kecamatan sosialisasi, 2 desa eks transmigrasi	100%
2	Jumlah dokumen inventarisasi kepemilikan lahan eks. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT )	100%	2 kecamatan sosialisasi, 2 desa Eks. Transmigrasi				100%
	Rata-rata Capaian						100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata capaian kinerja Seksi Bina Pengembangan Kawasan tahun 2021 terealisasi 100%. Kegiatan terlaksana dengan baik tanpa kendala yang berarti.

b) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (100%) dan tahun 2020 (100%). Kegiatan terlaksana dengan baik tanpa kendala yang berarti.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah BUMDesa yang mengikuti sosialisasi pembentukan BUMDesa bersama.

Terealisasi sebanyak 2 Kecamatan yang mengikuti sosialisasi pembentukan BUMDesa bersama dengan target awal 2 Kecamatan. Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang dihadapi.

- Jumlah dokumen inventarisasi kepemilikan lahan eks. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Terealisasi sebanyak 2 desa yang berarti terealisasi 100%. Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang dihadapi.

d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan fasilitasi untuk pembentukan BUMDesa bersama	Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	126.463.386,-
2	Melakukan inventarisasi kepemilikan lahan eks. Pemukiman Transmigrasi (UPT)	Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	150.513.330,-

- Program Peningkatan Kerjasama Desa
  - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
    - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 

Dengan indikator keluaran jumlah binaan badan kerjasama antar desa (BKAD) 7 kecamatan terealisasi 100%, jumlah sosialisasi pembentukan

Bumdes bersama terealisasi 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 126.463.386,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.891.500,- atau 59,22%

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

Dengan indikator keluaran jumlah laporan inventarisasi kepemilikan lahan (IPL) 1 buku terealisasi 100%, jumlah sosialisasi IPL 2 desa terealisasi 100%. Pagu anggaran sub kegiatan Rp. 150.513.330,- dengan realisasi keuangan Rp. 110.193.000,- atau 73,21%.

#### Foto Kegiatan Seksi Bina Pengembangan Kawasan





1) Kepala Seksi Bina Data dan Profil Desa

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja  
Kepala Seksi Bina Data dan Profil Desa tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melaksanakan bimtek pengelolaan data desa	Jumlah aparat desa yang mengikuti bimtek pengelolaan data desa yang terlatih	130 aparat desa	130 aparat desa	100%
2	Melakukan pendampingan penyusunan profil desa	Jumlah desa yang menyusun profil desa sesuai dengan ketentuan	130 desa	130 desa	100%
	Rata-rata capaian				100%

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah aparat desa yang mengikuti bimtek pengelolaan data desa yang terlatih	130 aparat desa	130 aparat desa	130 aparat desa	130 aparat desa	130 aparat desa	100%
2	Jumlah desa yang menyusun profil desa sesuai dengan ketentuan	130 desa	130 desa	130 desa	130 desa	130 desa	100%
	Rata-rata Capaian						100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata capaian kinerja Seksi Bina Data dan Profil Desa tahun 2021 terealisasi 100%.

b) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (100%) dan tahun 2020 (100%).

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah aparat desa yang mengikuti bimtek pengelolaan data desa yang terlatih. Terealisasi sebanyak 130 aparat desa yang mengikuti bimtek pengelolaan data desa yang terlatih dengan target 130 aparat desa, yang berarti terealisasi 100%. Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang dihadapi.
- Jumlah desa yang menyusun profil desa sesuai dengan ketentuan. Terealisasi sebanyak 130 desa yang telah melaksanakan pengelolaan data desa dengan baik dengan target 130 desa, yang berarti terealisasi 100%. Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang dihadapi.

d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja  
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan bimtek pengelolaan data desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	803.019.286,-
2	Melakukan monitoring pengelolaan data desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	803.019.286,-

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Dengan indikator keluaran terupdatenya data 130 buku profil desa dengan target 130 buku terealisasi 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 803.019.286,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 780.079.247,- atau 97,14%.

Foto Kegiatan Seksi Bina Data dan Profil Desa







2) Kepala Seksi Bina Adat dan Budaya

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja

Kepala Seksi Bina Adat dan Budaya Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Melakukan pembinaan pengurus lembaga adat desa	Jumlah pengurus lembaga adat yang dibina	130 Pengurus LAD	130 Pengurus LAD	100%
		Jumlah desa yang melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya	-	-	Tidak ada kegiatan/ anggaran
	Rata-rata capaian				100%

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah pengurus lembaga adat yang dibina	2 Desa	5 Desa	130 Pengurus LAD	130 Pengurus LAD	130 Pengurus LAD	100%
2	Jumlah desa yang melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya	-	-	-	-	-	Tidak ada kegiatan/ anggaran
	Rata-rata Capaian						100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata capaian kinerja Seksi Bina Adat dan Budaya Desa tahun 2021 terealisasi 100%, Ada 1 indikator yang belum dilaksanakan karena tidak ada kegiatannya/anggarnya.

b) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 (100%) dan tahun 2020 (100%).

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah pengurus lembaga adat yang dibina.

Kegiatan jumlah pengurus lembaga adat yang dibina terealisasi sebanyak 130 pengurus LAD desa yang mengikuti pembinaan pengurus lembaga adat desa dengan target 130 pengurus lembaga adat desa, yang terealisasi 100%. Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang dihadapi.

- Jumlah desa yang melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya tidak terealisasi dikarenakan tidak ada kegiatannya/anggarnya.

d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan pembinaan pengurus lembaga adat desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	94.272.406,-

			yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Hukum Adat	
--	--	--	---	------------	--

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat  
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa  
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat  
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga  
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat  
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Dengan indikator keluaran jumlah pengurus lembaga adat desa yang dibina dengan target 130  
pengurus lembaga adat desa dan terealisasi 100%. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp.  
94.272.406,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.450.447,- atau 77,91%

Berikut tabel/Daftar Lembaga/ Kelompok Adat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Nama Lembaga/ Kelompok Adat	Legalitas	Alamat	Keterangan
1	Panyipatan	Lembaga Adat Desa Kandangan Lama	Proses	Desa Kandangan Lama	3 LAD
		Lembaga Adat Desa Panyipatan	Proses	Desa Panyipatan	
		Lembaga Adat Desa Batakan Lestari	- SK Kepala Desa No. 07/SK/ XI/2012 Tanggal 2 November 2012 - Perdes No. 03 Tahun 2011 Tanggal 1 Maret 2011	Desa Batakan	
2	Takisung	Lembaga Adat Batu Lima	SK Kepala Desa No. 14/SK/ XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018	Desa Kuala Tambangan	4 LAD
		Lembaga Adat Tunas Sanghyang	SK Kepala Desa No. 7/SK/ IX/2018 Tanggal 6 September 2018	Desa Banua Tengah	
		Lembaga Adat Dadaringin	SK Kepala Desa No. 25/SK/XI/2018 Tanggal 18 Nopember 2018	Desa Ranggung	

		Lembaga Adat Desa Telaga Langsung	PROSES	Desa Telaga Langsung	
3	Jorong	Lembaga Adat Assamaturokeng	SK Kepala Desa No. 11/SK/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020	Desa Muara Asam-Asam	3 LAD
		Lembaga Adat Desa Asam-Asam	SK Kepala Desa No. 15/SK/X/2018 Tanggal 4 Mei 2018	Desa Asam-Asam	
		Lembaga Adat Hancap Gawi Sabumi	SK Kepala Desa No. 17/SK/VII/2019 Tanggal 30 Juli 2018	Desa Batalang	
4	Kintap	Lembaga Adat Dayak Maratus	SK Kepala Desa No. 21/SK-RA/IV/2017 Tanggal 17 April 2017	Desa Riam Adungan	4 LAD
		Lembaga Adat Desa Kebun Raya	SK Kepala Desa No. 25/SK/IV /2018 Tanggal 10 April 2018	Desa Kebun Raya	
		Lembaga Adat Desa Pandan Sari	SK Kepala Desa No. 15/SK/VII /2018 Tanggal 25 Juli 2018	Desa Pandan Sari	
		Lembaga Adat Banjar Karang Sari	- SK Kepala Desa No. 188/01/KEP-SBB/2018 Tanggal 30 Januari 2018 - SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : AHU-709-AH.02.01-Tahun 2011 Tanggal 17 Oktober 2011	Desa Sebambaru	
5	Bati-Bati	Lembaga Adat Maluka Sejahtera	SK Kepala Desa No. 5/SK/PEM/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018	Desa Pandahan Kec. Bati - Bati	3 LAD
		Lembaga Adat Ruhui Rahayu	SK Kepala Desa No. 16/SK/VII/2020 Tanggal 9 Juli 2020	Desa Sambangan Kec. Bati - Bati	
		Lembaga Adat Rambut Bagalung	Proses	Desa Ujung Baru Kec. Bati - Bati	
6	Batu Ampar	Lembaga Adat Banjar Suka Sari	- Akta Notaris No. 48 Tanggal 29 April 2016 - SK Kepala Desa	Desa Tajau Pecah	3 LAD

			No. 17/SK/VII/2016 Tanggal 20 Juli 2016		
		Lembaga Adat Desa Bluru	Proses	Desa Bluru	
		Lembaga Adat Desa Gunung Melati	Proses	Desa Gunung Melati	
7	Pelaihari	Lembaga Adat Begading Jaya	Sk Kepala Desa No. 08/Sk/Pem/Ix/2015 Tanggal 23 September 2015	Desa Bumi Jaya	4 LAD
		Lembaga Adat Manunggal Lestari	Sk Kepala Desa No. 16/Sk/Xii /2018 Tanggal 10 Desember 2018	Desa Kampung Baru	
		Lembaga Adat Langgeng Budoyo	Sk Kepala Desa No. 17/Sk/Iv/2018 Tanggal 27 April 2018	Desa Sumber Mulia	
		Lembaga Adat Kayangan Baru	Sk Kepala Desa No. 12/Vii/2020 Tanggal 5 Juli 2020	Desa Ambungan	
8	Kurau	Lembaga Adat Kampung Berkah	Sk Kepala Desa No. 20/Sk/ Viii/2018 Tanggal 3 Agustus 2018	Desa Sungai Bakau	3 LAD
		Lembaga Adat Desa Kurau	Proses	Desa Kurau	
		Lembaga Adat Desa Sarikandi	Proses	Desa Sarikandi	
9	Bumi Makmur	Lembaga Adat Lestari Bahari	Sk Kepala Desa No. 13/Sk/ Vii/2018 Tanggal 19 Juli 2018	Desa Handil Labuan Amas	7 LAD
		Lembaga Adat Waja Sampai Kaputing	Sk Kepala Desa No. 43/Sk/ Viii/2018 Tanggal 16 Agustus 2018	Desa Handil Birayang Atas	
		Lembaga Adat Assyafa'ah	Sk Kepala Desa No. 24/Sk/ Viii/2018 Tanggal 07 Agustus 2018	Desa Handil Gayam	
		Lembaga Adat Paris Tangkawang	Sk Kepala Desa No. 24/Sk/ Viii/2018 Tanggal 28 Agustus 2018	Desa Handil Birayang Bawah	



		Lembaga Adat Al-Barokah	Sk Kepala Desa No. 14/Sk/ Vii/2018 Tanggal 31 Juli 2018	Desa Sungai Rasau	
		Lembaga Adat Bumi Harapan Langkar	Proses	Desa Bumi Harapan	
		Lembaga Adat Bunga Padi	Proses	Desa Handil Maluka	
10	Tambang Ulang	Lembaga Adat Kayuh Baimbai	Sk Kepala Desa No. 16/Sk/Pem/2018 Tanggal 26 Oktober 2018	Desa Tambang Ulang	3 LAD
		Lembaga Adat Desa Bingkulu	Proses	Desa Bingkulu	
		Lembaga Adat Desa Martadah Baru	Proses	Desa Martadah Baru	

Foto Kegiatan Seksi Bina Adat dan Budaya







## Analisa Pencapaian Sasaran

Misi Kabupaten Tanah Laut yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, yaitu :

### 1. **Menciptakan Inovasi di Segala Sendi Kehidupan dan Pengembangan Industri Kreatif.**

Misi ini mengandung makna bagaimana meningkatkan inovasi di masyarakat dan mengembangkan industri kreatif untuk bisa meningkatkan kontribusi industri kreatif dalam perekonomian. Strategi yang akan dicapai yaitu pengembangan standar pelayanan untuk penyebarluasan informasi, dengan arah kebijakan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat.

Untuk mendukung Misi “**Menciptakan Inovasi di Segala Sendi Kehidupan dan Pengembangan Industri Kreatif**”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut memiliki Program dan Kegiatan, yaitu :

#### **- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**

adapun sub kegiatan yang termasuk kedalam program ini adalah :

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini masuk pada misi “Menciptakan Inovasi di Segala Sendi Kehidupan dan Pengembangan Industri Kreatif” dikarenakan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota salah satunya pembinaan posyantek desa dan kecamatan yang dibina. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Ini Juga Masuk pada Misi “Membangun Sinergitas yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” karena pada kegiatan ini juga melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga kemasyarakatan lainnya. Sehingga nantinya akan tercipta suatu inovasi-inovasi dari pemuda-pemuda yang ada di daerah pedesaan dengan menumbuhkan karya-karya produktif.

### 2. **Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Misi ini mengandung makna bagaimana meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, supaya meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik, transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja, pengembangan standar penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan arah kebijakan memberikan kesempatan kepada ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing PNS di lingkup Dinas PMD. Untuk mendukung Misi **“Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, adapun sub kegiatan yang termasuk kedalam program/kegiatan ini adalah :
    1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
    3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
    4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
    5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
    6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, adapun sub kegiatan yang termasuk kedalam program/kegiatan ini adalah :
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    3. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - c. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - d. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**3. Membangun Sinergitas yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

Misi ini mengandung makna peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi dan sosial budaya (pembangunan inklusif), peningkatan upaya membangun desa, menata kota. Diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan desa membangun. Dengan strategi meningkatkan partisipasi peran serta perempuan dalam pembangunan, mendorong tertib administrasi dalam pemerintahan desa, partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa, mengoptimalkan peran aparatur baik di pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan, meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, mengoptimalkan peran lembaga perekonomian desa dalam meningkatkan perekonomian desa, mendorong tertib administrasi pertanahan kawasan perdesaan dan mengoptimalkan lahan kawasan perdesaan. Dan arah kebijakan melakukan pembinaan terhadap PKK kecamatan maupun desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, pembinaan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, monev terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa, pemanfaatan lahan kawasan perdesaan dan monev terhadap lahan kawasan perdesaan.

Untuk mendukung Misi “**Membangun Sinergitas yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut memiliki Program dan Kegiatan, yaitu:

- **Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa**
  - a. **Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi**

**pemerintahan desa**

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

**- Program Peningkatan Kerjasama Desa**

**a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota

**- Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**

**a. Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota**

Sub Kegiatan Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan, kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

**- Program Administrasi Pemerintahan Desa**

**a. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**

**Sub Kegiatan**

Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa

Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa

**- Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**

**a. Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota**

Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan TTG

Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat

Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman,ketertiban, dan perlindungan masyarakat desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan

pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

- **Program Administrasi Pemerintahan Desa**

**a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD

Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

**b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa

**c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa

Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

- **Program Penataan Desa**

**a. Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa**

Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

## Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis

Capaian Sasaran Strategis untuk tahun 2021 merupakan capaian tahun ke tiga dalam renstra 2018- 2023 hal ini menjadi parameter keberhasilan dinas serta sebagai pendorong Peningkatan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, analisa atas capaian Kinerja pada Setiap sasaran dapat dilihat Sebagai berikut :

Sasaran	Indeks Desa Membangun
---------	-----------------------

Sasaran ini mengandung makna bagaimana Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan Kondisi Desa saat ini. Serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam meningkatkan klasifikasi status desa dikembangkan berdasar konsepsi bahwa Desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Indikator Desa membangun :

- Ketahanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial, Permukiman)
- Ketahanan Ekonomi (Ekonomi)
- Ketahanan Ekologi (Ekologi)

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan pagu Keseluruhan :

a. Pagu : Rp. 17.913.929.343,-

terdiri dari :

- Belanja Langsung Rp. 11.463.619.141,-
- Belanja Tidak Langsung Rp. 6.450.310.202,-

Untuk belanja langsung , dengan 8 (delapan) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan dengan realisasi capaian Keuangan Rp. 8.306.875.315,- diperoleh prosentase sebesar 75,60 %.

Ringkasan realisasi APBD terhadap 2021

Uraian	Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja Tidak Langsung</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.190.604.116,-	1.924.146.544,-
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.259.706.086,-	2.266.241.662,-
<b>Belanja Langsung</b>		
Belanja Barang dan Jasa	11.144.685.911,-	8.062.660.554,-
Belanja Modal	318.933.230,-	245.207.724,-

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OutPut Dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2021 Rp	Realisasi			
					Fisik/Kinerja	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9=(8/5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			87.912.626,-			45.002.047,-	51,19
01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (renstra, renja, renja perubahan)	3 dokumen	32.242.026,-	3 dokumen	100	28.314.347,-	87,82
		Jumlah terbayarnya Honorarium PTT untuk tenaga operator komputer dan pengolah data	12 bulan		12 bulan	100		
02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.354.600,-	1 dokumen	100	1.046.100,-	44,43
03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	1.771.400,-	1 dokumen	100	585.000,-	33,02
04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.260.300,-	1 dokumen	100	1.835.000,-	43,07
05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 dokumen	3.568.300,-	1 dokumen	100	1.403.800,-	39,34



	SKPD	SKPD						
06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP dan Pelaporan SKPD (LAKIP, LKPJ, LPPD dan PK)	4 dokumen	16.766.000,-	4 dokumen	100	5.467.800,-	32,61
07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan dekorasi orchid show	1 paket	26.950.000,-	1 paket	100	6.350.000,-	23,56
		Jumlah penyediaan dekorasi Tala Expo	1 paket					
		Jumlah penyediaan makan dan snack orchid show	55 orang/kali		30 orang/kali	54		
		Jumlah penyediaan makan dan snack Tala Expo	55 orang/kali					
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.458.984.612,-			4.192.514.806,-	
01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	6.450.310.202,-	14 bulan	100	4.190.388.206,-	
02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	1 laporan	1.616.600,-	1 laporan	100	0,-	0
03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan	18 laporan	7.057.810,-	18 laporan	100	2.126.600,-	30,13
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.077.360,-			23.837.000,-	95,05
01	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian batik tradisional	1 jenis	25.077.360,-	1 jenis	100	23.837.000,-	95,05
		Jumlah penyediaan pakaian dinas harian	1 jenis		1 jenis	100		

4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			451.009.914,-			373.899.661,-	82,90
01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 jenis	7.492.980,-	1 jenis	100	6.068.200,-	80,99
02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah belanja modal dan mesin	2 jenis	57.568.610,-	2 jenis	100	50.946.500,-	88,50
		Jumlah penyediaan alat/bahan kegiatan kantor	3 jenis		3 jenis	100		
03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 jenis	11.322.960,-	1 jenis	100	9.712.000,-	85,77
04	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan pengadaan	2 jenis	8.939.730,-	2 jenis	100	7.223.100,-	80,80
05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan belanja makanan dan snack rapat	990 orang/kali	365.685.634,-	287 orang/kali	29	299.949.861,-	82,02
		Jumlah penyediaan belanja perjalanan dinas dalam daerah	11 kecamatan		11 kecamatan	100		
		Jumlah penyediaan belanja perjalanan dinas diluar daerah	1 tahun		1 tahun	100		
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			262.284.256,-			176.738.350,-	67,38
01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	4 jenis	95.617.600,-	4 jenis	100	25.445.358,-	26,61
02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	22.250.000,-	3 jenis	100	9.280.000,-	41,71

03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan alat/ bahan kegiatan kantor	3 jenis	144.416.656,-	3 jenis	100	142.012.992,-	98,34
		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6 orang		6 orang	100		
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			95.250.491,-			82.524.350,-	86,64
01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 jenis	95.250.491,-	2 jenis	100	82.524.350,-	86,64
II	PROGRAM PENATAAN DESA							
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa			436.188.310,-			18.688.500,-	4,28
01	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	jumlah legalisasi batas wilayah administrasi desa	4 desa	400.624.520,-	0	0	18.688.500,-	4,66
02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina	260 orang	35.563.790,-	0	0	0,-	0
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
1	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa			276.976.716,-			185.084.500,-	66,82
01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah binaan badan kerjasama antar desa (BKAD) kecamatan	7 BKAD	126.463.386,-	7 BKAD	100	74.891.500,-	59,22

		Jumlah sosialisasi pembentukan BUMDesa bersama	1 kecamatan		1 kecamatan	100		
02	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi kepemilikan lahan (IPL)	1 buku	150.513.330,-	1 buku	100	110.193.000,-	73,21
		Jumlah sosialisasi IPL	2 desa		2 desa	100		
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			7.273.114.554,-			5.525.255.378,-	75,97
01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina	260 orang	130.827.366,-	260 orang	100	79.735.247,-	60,95
02	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina	260 orang	45.624.810,-	0	0	1.410.500,-	3,09
03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang di bina, tim evaluasi raperdes tentang APBDesa kecamatan	1454 orang	2.715.807.144,-	934 orang	64	2.019.605.358,-	74,36
04	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang diberikan pelatihan/bimbingan teknis	260 orang	445.216.086,-	260 orang	100	168.907.727,-	37,94
05	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah	Jumlah terbinanya penyelenggaraan	130 orang	25.367.200,-	0	0	0,-	0

	Desa	musyawarah desa						
06	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah badan usaha milik desa (BUMDesa) yang aktif	5 Bumdesa	234.095.116	5 Bumdesa	100	83.952.047,-	35,86
		Jumlah badan usaha milik desa (BUMDesa) yang terbentuk	100 Bumdesa		100 Bumdesa	100		
		Jumlah pelaksanaan badan usaha milik desa (BUMDesa)	1 kali		1 kali	100		
		Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas badan usaha milik desa (BUMDesa)	1 kali		1 kali	100		
07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	terpilih dan dilantiknya kepala desa	26 kades	2.546.023.120,-	26 kades	100	2.185.043.906,-	85,82
08	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Terupdatenya data 130 buku profil desa	130 buku	803.019.286,-	130 buku	100	780.079.247,-	97,14
09	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah aparatur kecamatan dan pemerintahan desa yang dibina	141 orang	24.720.400,-	141 orang	100	14.548.900,-	58,85
10	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang diberikan pelatihan/bimbingan teknis	390 orang	205.076.916,-	390 orang	100	176.257.946,-	85,95
11	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa berciri khas yang terbentuk	5 desa	97.337.110,-	5 desa	100	15.714.500,-	16,14
		Jumlah desa yang dievaluasi	11 desa		11 desa	100		
		Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1 kelurahan		1 kelurahan	100		

V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.547.130.504,-			1.874.711.892,-	73,60
01	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pengurus lembaga adat desa yang dibina	130 orang pengurus LAD	94.272.406,-	130 orang pengurus LAD	100	73.450.447,-	77,91
02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Jumlah pelaksanaan MTP	26 desa	1.310.417.880,-	25 desa	96	962.837.900,-	73,48

	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
		Jumlah pelaksanaan TMMD	1 desa		1 desa	100		
		Jumlah pelaksanaan Rakor Posyandu	1 kali/keg		0	0		
		Jumlah terdatanya SIP didesa	130 desa		130 desa	100		
03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah kec yang melakukan pemetaan usaha ekonomi desa	2 kec	66.427.950,-	2 kec	100	51.931.700,-	78,18
		Jumlah tersedianya pembuatan program revisi database PUEM	1 prog database		1 prog database	100		
04	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah terlaksananya keg sosialisasi posyantek	10 desa	312.488.806,-	10 desa	100	258.632.551,-	82,77
		Jumlah terlaksananya keikutsertaan Kab. Tanah Laut dalam Gelar TTG Nasional	1 kali keg		0	0		
		Jumlah terlaksananya koordinasi KPMD Tk. Kabupaten	2 kali keg		1 kali keg	50		
		Jumlah terlaksananya koordinasi KPSPAM Tk. Kabupaten	1 kali keg		1 kali keg	100		
		Jumlah terlaksananya lomba	1 kali keg		1 kali keg	100		

		kreasi dan inovasi TTG Tk. Kabupaten						
		Jumlah terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan Posyantek Desa	11 desa		10 desa	91		
		Jumlah terlaksananya Rembuk Posyantek Tk. Kabupaten	1 kali keg		1 kali keg	100		
05	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah pelaksanaan pencanangan desa sehat covid 19	1 kali keg	23.388.260,-	0	0	0,-	0
06	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pelaksanaan Jambore Kader Posyandu	1 kali keg	740.135.212,-	1 kali keg	100	527.859.294,-	71,32
		Jumlah pelaksanaan lomba	5 lomba		5 lomba	100		
		Jumlah pelaksanaan pelantikan ketua TP PKK	2 kali keg		kali keg	50		
		Jumlah pelaksanaan pelatihan	1 kali keg		1 kali keg	100		
		Jumlah pelaksanaan peringatan HKG PKK	1 kali HKG PKK		1 kali HKG PKK	100		
		Jumlah pelaksanaan pertemuan rutin bulanan	6 kali pertemuan		5 kali pertemuan	83		
		Jumlah pelaksanaan pertemuan PKK desa	6 kali pertemuan		6 kali pertemuan	100		
		Jumlah pelaksanaan Rakon PKK	1 kali rakon		1 kali rakon	100		



		Jumlah pelaksanaan sosialisasi pola asuh anak dan remaja	1 kali sosialisasi		1 kali sosialisasi	100		
		Jumlah pelaksanaan Workshop LP3 Organisasi Wanita	1 kali workshop		1 kali workshop	100		

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.079.986.570,-	2.040.191.081,-	3.190.604.116,-	1.924.146.544,-
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.379.547.595,-	1.810.560.942,-	3.259.706.086,-	2.266.241.662,-
<b>Belanja Langsung</b>				
Belanja Pegawai	27.100.000,-	25.400.000,-	6.450.310.202,-	4.190.388.206,-
Belanja Barang dan Jasa	5.194.902.391,-	4.154.524.292,-	11.144.685.911,-	8.062.660.554,-
Belanja Modal	306.600.000,-	276.199.000,-	318.933.230,-	245.207.724,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Upaya terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri sebagai pelaku pembangunan merupakan proses yang memerlukan kerja keras dari berbagai pihak yang mengemban amanat tersebut. Untuk itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut perlu senantiasa berupaya untuk pencapaian tata kelola Pemerintahan yang baik. Disamping itu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut senantiasa berkinerja produktif dalam memberikan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berorientasi kepada Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan terbitnya undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut telah Berupaya melakukan pembenahan proses kerja internal dan eksternal. Harapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi pendorong Pemerintahan Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Di samping itu dari perspektif keuangan realisasi penyerapan harus ditingkatkan agar konsistensi dapat dilakukan secara baik. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut perlu menekankan komitmen untuk terus belajar dan senantiasa tumbuh dalam meningkatkan semangat kerja dan kesadaran kerja dalam memacu kinerja yang lebih baik dalam rangka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam jangka panjang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi tentang berbagai capaian kinerja berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governace) di Kabupaten Tanah Laut

## B. Strategi Peningkatan Kinerja

Perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Pemerintahan, Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa.

Filosofi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan dasar /

fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Tekhnis, in house training).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
  - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023
  - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
  - c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementrian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan SKPD terkait dalam lingkup Kabupaten Tanah Laut, serta Lembaga/Instansi lainnya,dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tanah Laut.

Pada akhirnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut berupaya meningkatkan pembinaan (Komunikasi, Kerjasama dan Intensifikasi pendampingan) terhadap desa dalam rangka :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan masyarakat desa, melalu pengembangan peran serta LPM dalam proses perencanaan dan pembangunan, Pengembangan Lembaga Adat,

- c. Optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri, melalui pengembangan ekonomi desa (BUMDesa, Posyantek, Teknologi Tepat Guna (TTG)
- d. Melaksanakan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Demikian, penyusunan LAKIP hasil revidi tahun 2021 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparat pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Pelaihari, Januari 2022

  
Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanah Laut  
H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.IP, M.SI  
NIP. 19680818 199010 1 003